



PEMERINTAH KOTA METRO

Ringkasan Eksekutif

# KLHS RPJPD KOTA METRO 2025-2045

Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
Rencana Pembangunan Jangka  
Panjang Daerah Kota Metro  
Tahun 2025-2045



SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS

INDONESIA  
EMAS  
2045

Tahun Anggaran 2023



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini dapat diselesaikan dengan baik. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro disusun untuk memastikan rencana pembangunan daerah di Kota Metro selama 20 tahun ke depan dapat mengintegrasikan, menerapkan serta mengakomodir prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS merupakan rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dapat menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program, dalam hal ini perancangan awal RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka difokuskan pada target TPB yang belum tercapai dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan KLHS RPJPD Kota Metro Tahun 2025–2045. Besar harapan kami agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terwujud melalui berbagai perencanaan strategis.

**Metro, September 2023**

**Walikota Metro**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran KLHS .....	2
<b>BAB II Kondisi Umum Daerah.....</b>	<b>4</b>
2.1 Karakteristik Wilayah – <i>Baseline</i> .....	4
2.1.1 Wilayah Fungsional (Ekologis).....	4
2.1.2 Wilayah Perencanaan .....	4
2.1.3 Posisi Wilayah Perencanaan dalam Konstelasi Regional (Kebijakan) .....	5
2.1.4 Karakteristik Biogeofisik .....	6
2.2 Analisis 6 Muatan Lingkungan Hidup .....	8
2.2.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	8
2.2.2 Dampak Risiko Lingkungan Hidup .....	10
2.2.3 Kinerja Layanan Ekosistem / Jasa Lingkungan.....	11
2.2.4 Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim.....	13
2.2.5 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati.....	13
<b>BAB III Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....</b>	<b>14</b>
3.1 Pelaksanaan TPB di Kota Metro.....	14
3.2 Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar.....	16
3.2.1 Capaian Indikator TPB Pilar Sosial .....	16
3.2.2 Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi .....	16
3.2.3 Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan .....	17
3.2.4 Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola .....	18
<b>BAB IV Analisis Indikator TPB pada Perangkat Daerah (PD) .....</b>	<b>19</b>
4.1 Hasil Analisis Capaian TPB pada Perangkat Daerah (PD) .....	19
<b>BAB V Alternatif Skenario dan Rekomendasi.....</b>	<b>20</b>



5.1	Hasil Identifikasi TPB Paling Strategis Kota Metro .....	20
5.2	Skenario Pencapaian Target Terhadap TPB Paling Strategis .....	21
5.2.1	Skenario Pencapaian Target Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (TPB 11) .....	21
5.2.2	Skenario Pencapaian Target Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6).....	23
5.2.3	Skenario Pencapaian Target Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3) .....	26
5.3	Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan Awal RPJPD Kota Metro 2025-2045 .....	28
<b>BAB VI</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>55</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proporsi Capaian TPB Kota Metro Tahun 2025.....	15
Gambar 2 Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Sosial.....	16
Gambar 3 Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Ekonomi .....	17
Gambar 4 Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Lingkungan .....	17
Gambar 5 Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	18
Gambar 6 Grafik Capaian Indikator TPB per PD Kota Metro .....	19
Gambar 7 Proses Sintesis Untuk Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Strategis .....	20
Gambar 8 Proyeksi dan Capaian: Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum.....	21
Gambar 9 Proyeksi Capaian dan Target: persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani.....	22
Gambar 10 Proyeksi Capaian dan Target: Akses Terhadap Layanan Air Minum Layak.....	23
Gambar 11 Proyeksi Capaian dan Target: Kapasitas Prasarana Air Baku.....	24
Gambar 12 Proyeksi Capaian dan Target: Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum.....	25
Gambar 13 Proyeksi Capaian dan Target: Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi.....	26
Gambar 14 Proyeksi Capaian dan Target: Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.....	27



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Jasa Ekosistem Dominan Kota Metro.....	12
Tabel 2 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap TPB 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan.....	28
Tabel 3 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	36
Tabel 4 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera .....	42
Tabel 5 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim .....	48
Tabel 6 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap TPB 15 Ekosistem Daratan .....	51
Tabel 7 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap 7 Energi Bersih dan Terjangkau .....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (*nation buildings*) (Siagian, 1994). Pembangunan daerah merupakan upaya mencapai pembangunan yang berimbang (*balance development*) atau dapat diartikan sebagai proses transformasi yang dilakukan pada daerah tertentu, baik secara fisik maupun sosial-ekonomi, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Pemerintah Kota Metro akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2025. Sesuai dengan pasal 19 ayat 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan cakupan/bagian dalam penyusunan Rancangan Awal RPJPD.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 32/2009 yang mewajibkan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program.

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap RPJPD Provinsi Lampung 2025–2045 dianggap perlu untuk menindaklanjuti melalui Perubahan RPJPD. Beberapa hal yang mendasari perlunya penyusunan Perubahan RPJPD Provinsi Lampung 2025–2045 adalah untuk menyelaraskan dinamika kebijakan pembangunan yang terjadi saat ini seperti program-program dalam RPJMN. Mulai dilakukannya penyusunan perubahan RPJPD Provinsi Lampung juga diikuti dengan akan dimulainya penyusunan RPJPD Kota Metro 2025–2045, dimana pemerintah daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk menyusun RPJPD tahun 2025–2045 menuju kegiatan pilkada serentak yang akan dilaksanakan.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Melalui uraian sebelumnya, maka dengan akan disusunnya dokumen RPJPD Kota Metro 2025–2045 yang akan mengubah kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) pada RPJPD Kota Metro, penyusunan KLHS RPJPD ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan nantinya akan menjadi dasar serta terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program pada RPJPD Kota Metro 2025–2045. Selain itu, dokumen KLHS RPJPD juga akan bermanfaat sebagai pedoman bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030.

## **1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran KLHS**

Maksud dari kegiatan Penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 Kota Metro adalah menjadi dasar untuk memastikan bahwa prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) RPJPD Kota Metro yang terjadi dalam penyusunan.

Tujuan penyusunan KLHS RPJPD Kota Metro yaitu melakukan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang memuat kajian:



- a. Menyediakan dokumen KLHS yang dapat memberikan pandangan yang komprehensif terhadap arahan, kebijakan dan program yang tertuang dalam perubahan RPJPD berdasarkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan kondisi lingkungan hidup Kota Metro;
- b. Melaksanakan Analisis Muatan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 32/2009 atau Pasal 13 PP No. 46/2016.

Sasaran yang diharapkan dari penyusunan dokumen KLHS RPJPD Kota Metro ini yaitu tersusunnya dokumen KLHS RPJPD Kota Metro Tahun 2025–2045 yang memuat analisis sistematis terhadap penyelenggaraan KLHS RPJPD sesuai dengan aturan yang berlaku

## BAB II

# KONDISI UMUM DAERAH

### 2.1 Karakteristik Wilayah – *Baseline*

#### 2.1.1 Wilayah Fungsional (Ekologis)

Batas Ekologis merupakan wilayah yang akan dilakukan kajian lingkungan. Wilayah yang dimaksud memiliki interkoneksi secara ekologis maupun sosial terhadap wilayah perencanaan KRP. Sedangkan menurut Lampiran I Permen LH No. 16 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Batas Ekologis adalah ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis yang digunakan untuk deliniasi adalah batas daerah aliran sungai (DAS) sekitar Kota Metro dengan skala 1:50.000 yang didukung oleh peta sungai dan digital elevation model (DEM).

Wilayah Administrasi Kota Metro meliputi batas ekologis dari dua DAS yakni DAS Seputih dan DAS Sekampung dengan total luas wilayah fungsional dari KLHS seluas 28.450,08 Ha, dengan batas fungsional pada DAS Seputih seluas 18.987,38 Ha (67%), dan DAS Sekampung mencakup luas 9.462,69 Ha (33%).

#### 2.1.2 Wilayah Perencanaan

Kota Metro merupakan salah dari 15 kabupaten/kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Lampung. Posisi geografis Kota Metro berada pada bagian tengah Provinsi Lampung ke arah timur yang dilewati jalur penghubung antara lintas tengah dengan lintas timur Sumatera dengan topografi wilayahnya yang relatif datar. Kota Metro terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Metro. Secara administrasi Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dengan 22 Kelurahan. Kota Metro

memiliki kondisi topografi berupa daerah dataran aluvial. Ketinggian daerah ini berkisar antara 5 - 100 dpl, dan dengan kemiringan 0 % sampai 15 %.

Secara geografis, Kota Metro terletak pada 5° 6' - 5° 8' Lintang Selatan dan 105° 17' - 105° 19' Bujur Timur. yang berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung. Hal tersebut dikarenakan letak geografis Kota Metro sendiri dengan batas – batas administrasi wilayah Kota Metro berbatasan langsung dengan :

- **Sebelah Utara** : Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
- **Sebelah Timur** : Kabupaten Lampung Timur
- **Sebelah Selatan** : Kabupaten Lampung Timur
- **Sebelah Barat** : Kabupaten Lampung Tengah

Kota Metro memiliki 22 Kelurahan dan 5 Kecamatan terdiri dari Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Pusat dengan ibu kota berada pada Kecamatan Metro Pusat. Menurut luas administrasi di Kota Metro, diketahui bahwa Kecamatan Metro Utara memiliki luas yang lebih besar jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu sebesar 2.174,65 Ha atau 30% dari luas total wilayah kota. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Mulyojati dengan luas sebesar 1.151,71 Ha atau 16% dari luas total wilayah kota.

### 2.1.3 Posisi Wilayah Perencanaan dalam Konstelasi Regional (Kebijakan)

Posisi wilayah perencanaan dalam konstelasi regional Kota Metro ditentukan oleh berbagai faktor seperti posisi geografis, faktor ekonomi, dan faktor budaya dan sosial. Memahami dan memanfaatkan faktor-faktor ini dengan baik dapat membantu wilayah perencanaan untuk mengoptimalkan potensi mereka dalam konteks regional, memperkuat konektivitas dengan wilayah-wilayah sekitarnya.

Pada wilayah Kota Metro kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang berpengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan yang dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam

mendukung penataan ruang wilayah. Kota Metro diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota, perdagangan dan jasa, dan pendidikan khusus. Pusat tersebut dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya. Pusat tersebut dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya.

## 2.1.4 Karakteristik Biogeofisik

### 2.1.4.1 Ekoregion

Ekoregion di Kota Metro terbagi menjadi 2 yaitu Dataran Fluvio Gunung Api dan Dataran Kaki Gunung. Dataran fluvio gunung api merupakan satuan bentuk lahan dengan topografi datar dan terbentuk oleh pengendapan dari proses fluvial. Sedangkan Dataran Kaki Gunung merupakan satuan bentuk lahan yang lebih datar dan terbentuk dari pengendapan material oleh proses fluvial.

### 2.1.4.2 Topografi dan Kemiringan Lereng

Kota Metro sebagian besar berada kelerengan datar dan landai, dengan kondisi kelerengan tersebut Kota Metro bisa melakukan pembangunan fisik dan pemanfaatan ruang yang lebih tinggi namun tetap memperhatikan aspek lingkungan di sekitar.

### 2.1.4.3 Formasi dan Struktur Geologi

Kota Metro berada pada formasi *Tuff* Lampung dan diperkirakan berumur Kuartar serta memiliki komposisi lempung bertuff dan batu pasir. Tanah vulkanis (tanah *tuff*) ialah tanah yang terjadi akibat pelapukan batuan vulkanis. Pada umumnya jenis tanah ini mudah meresap air, tetapi daya menahan air sangat kurang sehingga mudah tererosi. Tanah ini digunakan untuk persawahan, tanaman palawija, tebu, tembakau, sayur-sayuran, dan perkebunan.

### 2.1.4.4 Hidrologi

Wilayah Kota Metro terdiri dari 2 (Dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sekampung yang ada di bagian Selatan Kota Metro dan DAS Seputih yang ada di bagian

Utara Kota Metro. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Metro didominasi oleh DAS Seputih dengan luas 4.628 Ha yang melewati 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Metro Barat, Metro Pusat, Metro Timur dan Metro Utara. Sedangkan DAS Sekampung memiliki luas 2.687 Ha yang juga dilewati 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Metro Barat, Metro Pusat, Metro Selatan dan Metro Timur.

#### 2.1.4.5 Klimatologi

Kondisi curah hujan di Kota Metro memiliki tiga curah hujan yaitu 1.500-1.600 mm/tahun, 1.600-1.700 mm/tahun, dan 1.700-1.800 mm/tahun. Curah hujan dominan di Kota Metro yaitu 1.500-1.600 mm/tahun sangat rendah dengan luas 3.581 Ha atau 49%. Curah hujan tertinggi pada bulan November. Sedangkan rata-rata hari hujan di Kota Metro, yaitu 14 hari/bulan, dan paling banyak terjadi pada bulan Januari dan paling sedikit pada bulan Juli.

#### 2.1.4.6 Penutup Lahan

Penutupan lahan terbesar yaitu permukiman dengan luas 3.430 Ha (47%). Seiring dengan berkembangnya penduduk tidak menutup kemungkinan meningkatkan kebutuhan akan lahan permukiman semakin bertambah.

Selain penutupan lahan permukiman, sawah merupakan penutupan lahan yang paling luas setelah permukiman yaitu seluas 2.955 Ha (40%). Sedangkan penutupan lahan paling sedikit yaitu tubuh air dan pertanian lahan kering campur yaitu masing-masing seluas 22 Ha dan 249 Ha.

#### 2.1.4.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbesar yaitu sawah dengan persentase luas 3.072 Ha (41,99%). Namun seiring dengan berkembangnya penduduk tidak menutup kemungkinan meningkatkan kebutuhan akan lahan permukiman, luas penggunaan lahan terbangun di Kota Metro mencapai 994 Ha (13,58%).

#### 2.1.4.8 Rawan Bencana

kondisi rawan gerakan tanah di Kota Metro, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi wilayah tersebut tergolong ke dalam klasifikasi rawan gerakan tanah dengan kategori rendah dan menengah. Dengan luas masing-masing yaitu 6.569 Ha dan 748 Ha. Klasifikasi rawan gerakan tanah dengan klasifikasi rendah tersebar di seluruh Kecamatan dan paling luas yaitu Kecamatan Metro Utara dengan luas 2.214 Ha (33,70% dari total luas rawan gerakan tanah kategori rendah). Sedangkan untuk rawan bencana gerakan tanah menengah berlokasi di Kecamatan Metro Selatan dengan luas 748 Ha. Selain itu rawan gempa bumi di seluruh wilayah Kota Metro masuk dalam kategori rendah.

## 2.2 Analisis 6 Muatan Lingkungan Hidup

### 2.2.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

#### 2.2.1.1 Daya Dukung Air

Analisis daya tampung air di Kota Metro dilaksanakan dengan membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan air di daerah tersebut. Total kebutuhan air di Kota Metro pada Kecamatan Metro Utara memiliki kebutuhan air paling signifikan, mencapai 534.442.590,83 m<sup>3</sup> per tahun. Disusul oleh Kecamatan Metro Selatan yang memerlukan sekitar 505.347.549,68 m<sup>3</sup> per tahun, dan Kecamatan Metro Barat dengan kebutuhan sekitar 252.764.921,55 per tahun. Sementara itu, kebutuhan air terendah tercatat di Kecamatan Metro Pusat, hanya sekitar 81.285.656,74 m<sup>3</sup> per tahun.

Ketersediaan air di Kota Metro dianalisis dengan mempertimbangkan zona DAS (Daerah Aliran Sungai) dan jasa ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Data mengenai ketersediaan air hasil perhitungan dapat ditemukan dalam Tabel 3.25. Kecamatan Metro Utara menunjukkan ketersediaan air terbesar di antara semua kecamatan di Kota Metro selama satu tahun, mencapai 2.570.426.915,63 m<sup>3</sup>. Di sisi lain, Kecamatan Metro Timur memiliki ketersediaan air terendah, yakni sekitar 6.618.511,48 m<sup>3</sup> per tahun.

Status Daya Dukung air secara keseluruhan di Kota Metro belum terlampaui, menunjukkan bahwa masih ada kapasitas untuk pertumbuhan penduduk dalam batas yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan air. Wilayah dengan status daya dukung terlampaui memiliki ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap wilayah lain yang memiliki daya dukung belum terlampaui. Sehingga wilayah yang belum terlampaui tersebut perlu dipelihara fungsinya sebagai lahan penyedia air bersih karena sangat berperan penting sebagai sumber penyedia air bersih untuk wilayah lain.

#### 2.2.1.2 Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Daya dukung pangan dihitung untuk melihat status daya dukung pangan, dimana status daya dukung dilihat dari ambang batas daya dukung. Berdasarkan hasil analisis, Secara keseluruhan, ketersediaan pangan untuk Kota Metro per tahun mencapai 5.992.494.200 kkal/tahun. Ketersediaan pangan dengan jumlah terbesar di Kota Metro berada di Kecamatan Metro Selatan, dengan jumlah kebutuhan mencapai 1.693.796.830 kkal/tahun. Sedangkan ketersediaan pangan yang paling kecil berada di Kecamatan Metro Pusat dengan jumlah ketersediaan mencapai 531.986.730 kkal/tahun. Hal ini sejalan dengan pola distribusi penggunaan lahan berupa sawah yang ada di Kota Metro.

Kebutuhan pangan dianalisis sesuai dengan model distribusi penduduk yang menjadi acuan dalam kebutuhan dengan perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.150 kkal per kapita/hari (Permenkes No.75 Tahun 2013). Berdasarkan berdasarkan hasil analisis menggunakan grid spasial distribusi penduduk, diketahui bahwa kebutuhan pangan di Kota Metro berkisar 136.716.006.000 kkal/tahun. Diketahui bahwa kecamatan yang memiliki kebutuhan pangan tinggi adalah Kecamatan Metro Pusat (42.857.551.750 kkal/tahun) dan Metro Timur (31.499.865.000 kkal/tahun). Sedangkan Kecamatan Metro Selatan dan Metro Barat memiliki angka kebutuhan pangan yang paling rendah masing-masing sebesar 14.057.226.750 kkal/tahun dan 31.499.865.000 kkal/tahun. Hal

ini sebanding dengan pola sebaran jumlah penduduk yang tersebar di masing-masing kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa kondisi daya dukung pangan Kota Metro sudah melampaui daya dukungnya di setiap Kecamatan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyediaan pangan dari wilayah sekitar sehingga pemenuhan pangan bisa terpenuhi dan tidak mengalami krisis pangan.

## **2.2.2 Dampak Risiko Lingkungan Hidup**

### **2.2.1.1 Kebencanaan**

Kondisi rawan gerakan tanah di Kota Metro, diketahui bahwa secara keseluruhan kondisi wilayah tersebut tergolong ke dalam klasifikasi rawan gerakan tanah dengan kategori rendah dan menengah. Dengan luas masing-masing yaitu 6.569 Ha dan 748 Ha. Klasifikasi rawan gerakan tanah dengan klasifikasi rendah tersebar di seluruh Kecamatan dan paling luas yaitu Kecamatan Metro Utara dengan luas 2.214 Ha (33,70% dari total luas rawan gerakan tanah kategori rendah).

### **2.2.1.2 Timbulan Sampah**

Salah satu residu yang muncul dari kegiatan domestik adalah sampah. sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan baik pencemaran tanah, air, maupun udara. Potensi timbulan sampah yang dihitung merupakan sampah domestik yang dihitung menggunakan jumlah penduduk Kota Metro. Jumlah timbulan sampah yang digunakan adalah 2,5 L/orang/hari sesuai dengan SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hasil analisis jumlah timbulan sampah pada tahun 2022 di Kota Metro mencapai 156.191.730 L/Tahun. Jika dilihat berdasarkan pola sebarannya, terlihat bahwa Kecamatan Metro Pusat (48.558.708 L/Tahun) serta Kecamatan Metro Timur (34.971.544 L/Tahun) memiliki potensi timbulan sampah yang tinggi. Sedangkan timbulan sampah paling kecil berlokasi pada Kecamatan Metro Selatan (16.273.504 L/Tahun).



### 2.2.1.3 Timbulan Lumpur Tinja

Lumpur tinja merupakan salah satu residu yang timbul dari aktivitas manusia. lumpur tinja yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran, terutama pencemaran air dimana air dapat tercemar bakteri E. coli. Proyeksi timbulan lumpur tinja dihitung dengan menggunakan jumlah penduduk Kota Metro. Timbulan lumpur tinja yang dihitung dengan standar 42 Liter/orang/tahun (Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, 2017). Berdasarkan hasil analisis jumlah timbulan lumpur tinja pada tahun 2022 di Kota Metro mencapai 7.189.041 L/Tahun. Jika dilihat berdasarkan pola sebarannya, terlihat bahwa Kecamatan Metro Pusat (2.235.042 L/Tahun) dan Metro Timur (1.609.683 L/Tahun) memiliki potensi timbulan lumpur tinja yang tinggi. Selain itu, sebagian kecil berlokasi di Kecamatan Metro Selatan (748.950 L/Tahun).

### 2.2.1.4 Potensi Beban Pencemar

Potensi beban pencemar zat BOD dan COD paling tinggi berlokasi di Kecamatan Metro Selatan dengan beban pencemar masing-masing 3.891 kg/hari dan 5.889 kg/hari. Hal ini menunjukkan tingkat BOD dan COD yang tinggi dalam air dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan kerusakan ekosistem sungai. Sementara untuk TSS paling tinggi berlokasi di Kecamatan Metro Pusat dengan beban pencemar 1.335 kg/hari tingkat TSS yang tinggi dapat merusak kualitas air dan mengurangi penetrasi cahaya ke dalam air, yang dapat berdampak pada ekosistem akuatik. Potensi beban pencemar juga dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk dan perubahan penggunaan lahan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam upaya pengelolaan air limbah domestik dan non domestik.

## 2.2.3 Kinerja Layanan Ekosistem / Jasa Lingkungan

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air;

manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrisi dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasi. Adapun berikut adalah rekapitulasi analisis jasa ekosistem di Kota Metro.

**Tabel 1 Rekapitulasi Jasa Ekosistem Dominan Kota Metro**

Jenis JE	Jenis Jasa Ekosistem	Kelas JE Dominan	Luas JE Dominan (Ha)	Persentase (%)
JE Penyediaan	JE Penyedia Air Bersih	Sedang	4.336,11	59,27
	JE Penyedia Pangan	Sangat Tinggi	3.398,73	46,46
	JE Penyedia Serat	Sedang	4.358,48	59,58
	JE Sumber Daya Genetik	Sedang	7.146,29	97,68
	JE Penyedia Energi	Rendah	6.523,51	89,17
JE Pengaturan	JE Tata Aliran Air dan Banjir	Sedang	4.021,29	54,97
	JE Pengaturan Iklim	Rendah	6.670,82	91,18
	JE Pengaturan Bencana	Sedang	4.134,61	56,52
	JE Pemurnian Air	Rendah	7.189,82	98,28
	JE Pengaturan Limbah	Sedang	7.189,93	98,28
	JE Pengaturan Kualitas Udara	Rendah	6.582,77	89,98
	JE Penyerbukan Alami	Rendah	6.366,64	87,03
	JE Pengendalian Hama	Sedang	6.632,97	90,67
JE Budaya	JE Rekreasi dan Ekowisata	Rendah	4.031,80	55,11
	JE Ruang Hidup	Sedang	4.435,89	60,63
	JE Estetika Alam	Sangat Rendah	7.189,82	59,27
JE Pendukung	JE Biodiversitas	Rendah	7.146,40	46,46
	JE Siklus Hara	Rendah	6.632,99	59,58
	JE Produksi Primer	Sedang	7.234,01	97,68
	JE Pembentukan Lapisan Tanah	Sedang	7.234,01	89,17

Sumber: Hasil Analisis 2023

## 2.2.4 Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim

### 1) Banjir

Wilayah Kota Metro memiliki indeks bahaya banjir mulai dari klasifikasi tinggi sampai dengan rendah yang tersebar di setiap kecamatan. Kecamatan Metro Utara merupakan daerah dengan klasifikasi tinggi bahaya bencana banjir paling luas sekitar 1.197 Ha dari total luas risiko banjir secara keseluruhan. Selain itu, Kota Metro tergolong ke dalam klasifikasi Indeks Kerentanan Banjir dan Indeks Risiko Banjir yang tinggi, dengan wilayah yang mendominasi berada di kecamatan Metro Utara.

### 2) Cuaca Ekstrem

Indeks bahaya cuaca ekstrim tersebar pada seluruh kecamatan di Kota Metro dengan indeks tinggi hingga rendah. Indeks bahaya cuaca ekstrim yang dominan di Kota Metro adalah indeks pada kelas tinggi.

## 2.2.5 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Klasifikasi yang paling dominan dalam tabel adalah Klasifikasi Jasa Ekosistem Rendah dengan luas yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa ada area ekosistem di Kota Metro yang memiliki dukungan keanekaragaman hayati yang rendah, yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya pelestarian dan pemulihan ekosistem. Pengaruh klasifikasi Jasa Ekosistem Rendah terhadap Kota Metro adalah perlunya upaya konservasi dan restorasi untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Melalui langkah-langkah seperti penanaman kembali vegetasi asli, rehabilitasi habitat, perlindungan spesies terancam, dan pendidikan lingkungan, pengaruh negatif terhadap ekosistem dapat dikurangi dan keanekaragaman hayati dapat dipulihkan. Ini akan berdampak positif pada kualitas lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta kesejahteraan masyarakat Kota Metro yang bergantung pada layanan dan sumber daya ekosistem yang beragam.

## BAB III

# ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pelaksanaan TPB di Indonesia bertujuan untuk meraih 17 tujuan melalui pengembangan 169 target dan 319 indikator TPB. Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota, berperan aktif sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan urusan dan kewenangannya, terdapat 319 indikator TPB yang dibagi menjadi empat kategori kewenangan:

- Kewenangan pusat dengan 308 indikator,
- Kewenangan provinsi dengan 235 indikator,
- Kewenangan kabupaten dengan 220 indikator, dan
- Kewenangan kota dengan 222 indikator.

Ada beberapa aspek yang menentukan pembagian indikator TPB untuk setiap daerah, seperti kekhususan indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator dalam muatan RPJPD. Sementara itu, Kota Metro telah memulai evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator TPB yang dikelompokkan ke dalam empat kategori:

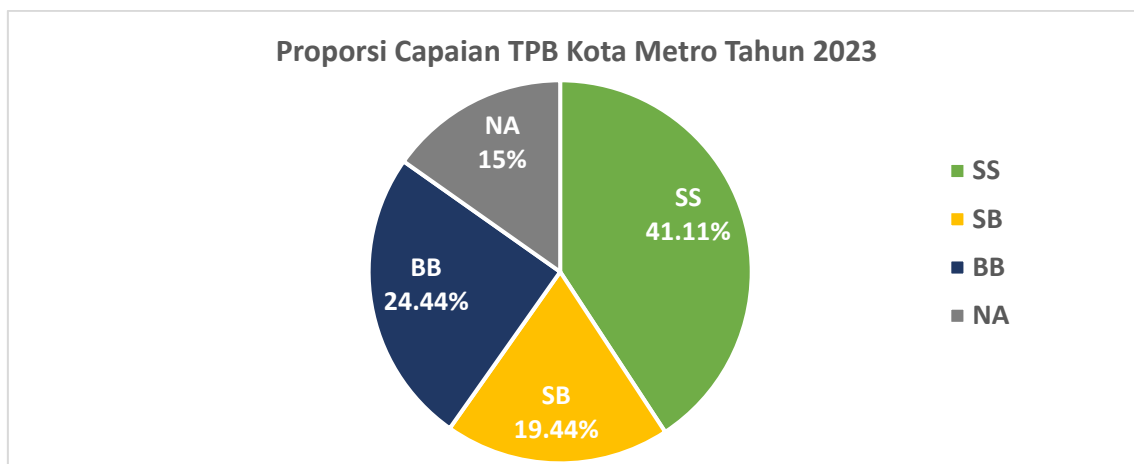
1. Indikator yang telah terlaksana dan mencapai target nasional (SS)
2. Indikator yang telah dijalankan namun belum mencapai target nasional (SB)
3. Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)
4. Indikator yang tidak/belum terdapat data (NA)

### 3.1 Pelaksanaan TPB di Kota Metro

Pada tahapan pelaksanaan TPB yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Metro, telah diterapkan sebanyak 180 indikator TPB yang relevan dengan wewenang Kota Metro. Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar 59,78% dari 180 indikator TPB yang sesuai dengan kebutuhan dan relevansi untuk Kota Metro telah terpenuhi.

Secara spesifik, sebanyak 74 indikator atau sekitar 41,11% telah berhasil mencapai target nasional sebagaimana diatur dalam Perpres 59 Tahun 2017, sementara 35 indikator (19,44%) telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Adapun sebanyak 44 indikator atau 24,44% termasuk dalam kategori belum mencapai target dan belum dilaksanakan, sedangkan 27 indikator (15%) tidak ada/belum tersedia data sehingga perlu dilaksanakan proses pengumpulan data lebih lanjut.

Melihat hasil implementasi TPB di Kota Metro, indikator yang telah terpenuhi dan mencapai target nasional masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan indikator yang belum terpenuhi atau yang belum memiliki data. Situasi ini mengindikasikan bahwa dalam rangka pencapaian dan penyediaan data SDGs untuk penyusunan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, Kota Metro perlu meningkatkan upaya dan strategi yang lebih efektif.



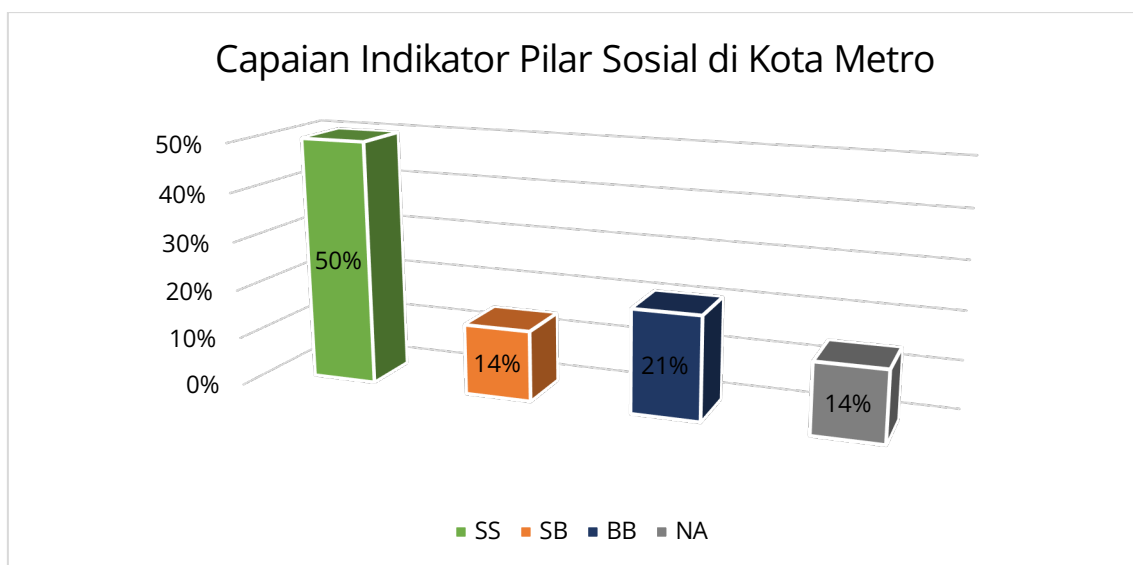
**Gambar 1 Proporsi Capaian TPB Kota Metro Tahun 2025**

*Sumber: Hasil Analisis, 2023*

## 3.2 Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar

### 3.2.1 Capaian Indikator TPB Pilar Sosial

Pilar sosial dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ada di Kota Metro mencakup 5 TPB, di antaranya adalah TPB 01, TPB 02, TPB 03, TPB 04, dan TPB 05. Sedangkan total capaian indikator untuk pilar sosial adalah sebanyak 90 indikator. Dari total capaian indikator pilar sosial, terdapat 45 indikator telah mencapai target, 13 indikator belum mencapai target, 19 indikator belum dilaksanakan, dan 13 indikator tidak ada data.

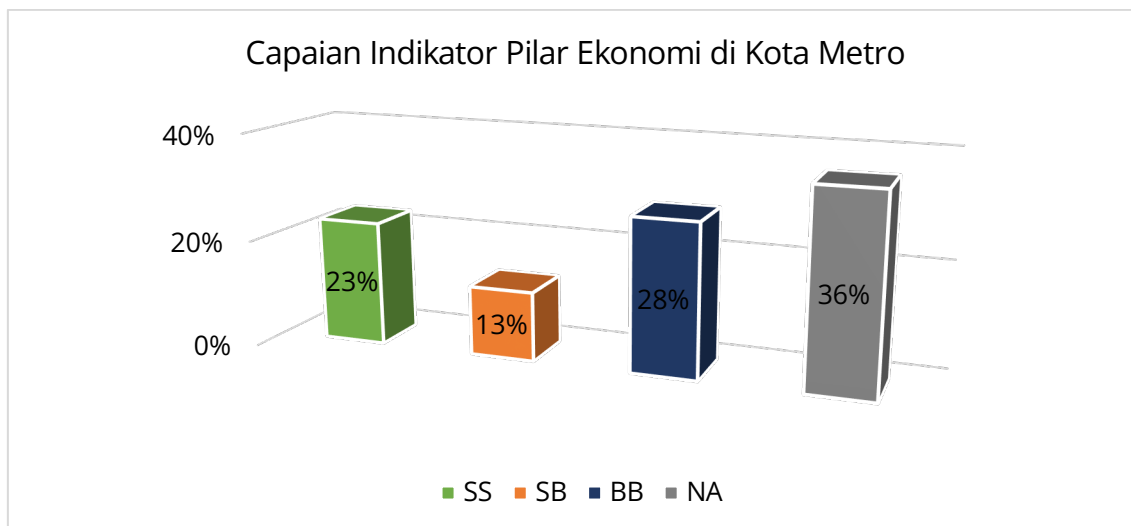


**Gambar 2 Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Sosial**

*Sumber: Hasil Analisis, 2023*

### 3.2.2 Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ada di Kota Metro mencakup 5 TPB, di antaranya adalah TPB 07, TPB 08, TPB 09, TPB 10, dan TPB 17. Sedangkan total capaian indikator untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 39 indikator. Dari total capaian indikator pilar ekonomi, terdapat 9 indikator telah mencapai target, 5 indikator belum mencapai target, 11 indikator belum dilaksanakan, dan 14 indikator tidak ada data.

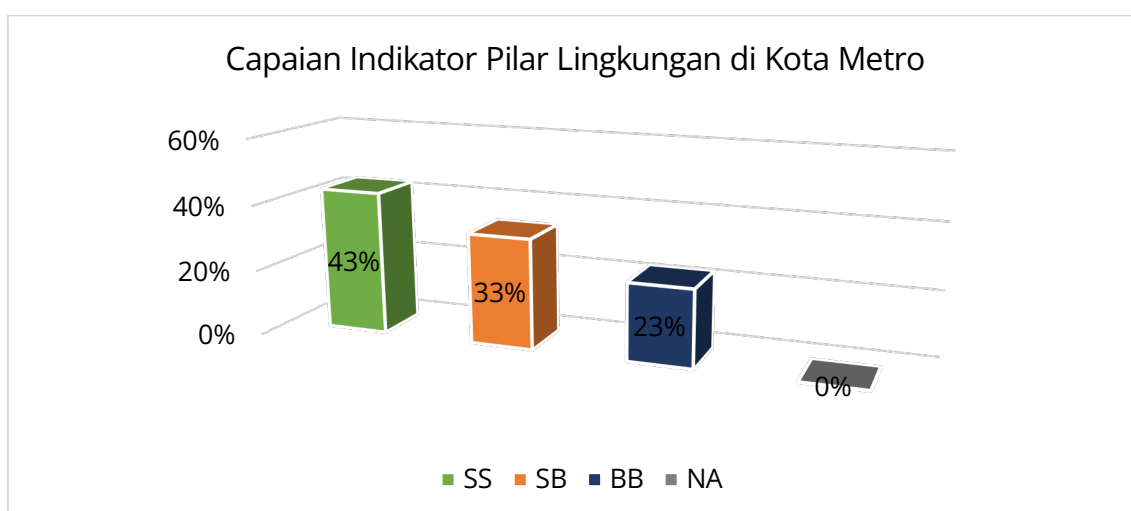


**Gambar 3 Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Ekonomi**

*Sumber: Hasil Analisis, 2023*

### 3.2.3 Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ada di Kota Metro mencakup 5 TPB, di antaranya adalah TPB 06, TPB 11, TPB 12, TPB 13, dan TPB 15. Sedangkan total capaian indikator untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 30 indikator. Dari total capaian indikator pilar lingkungan, terdapat 13 indikator telah mencapai target, 10 indikator belum mencapai target, 7 indikator belum dilaksanakan, dan 0 indikator tidak ada data.

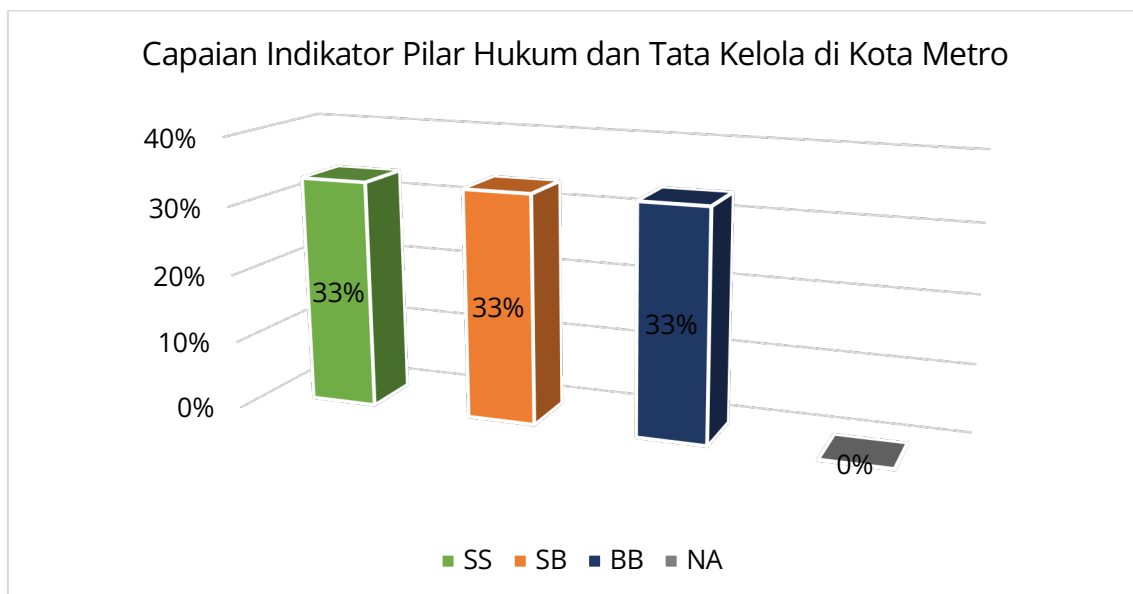


**Gambar 4 Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Lingkungan**

*Sumber: Hasil Analisis, 2023*

### 3.2.4 Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ada di Kota Metro mencakup 1 TPB, di antaranya adalah TPB 16 saja. Sedangkan total capaian indikator untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator. Dari total capaian indikator pilar hukum dan tata kelola, terdapat 7 indikator telah mencapai target, 7 indikator belum mencapai target, 7 indikator belum dilaksanakan, dan 0 indikator tidak ada data.



Gambar 5 Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Sumber: Hasil Analisis, 2023

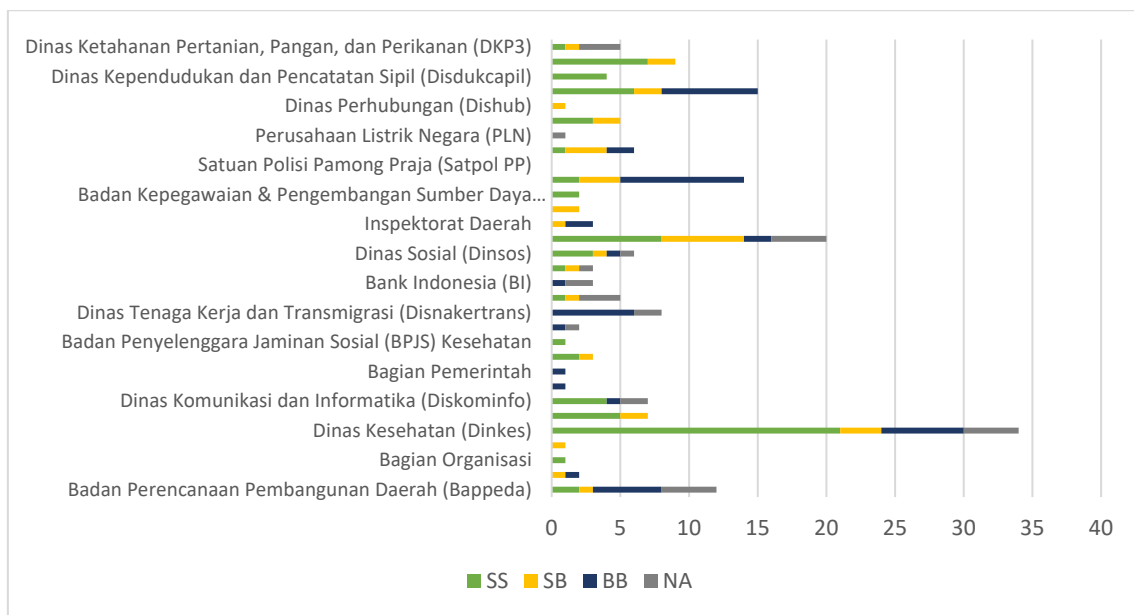


## BAB IV

### ANALISIS INDIKATOR TPB PADA PERANGKAT DAERAH (PD)

#### 4.1 Hasil Analisis Capaian TPB pada Perangkat Daerah (PD)

Berdasarkan kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah (PD), analisis capaian berfokus pada masing-masing indikator TPB yang sudah dilakukan setiap PD. Hasil dari kondisi capaian dan analisis menjadi salah satu bahan dalam mengidentifikasi isu strategis Kota Metro yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing PD dengan melihat urusan yang ditangani oleh PD itu sendiri dan menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh setiap PD.



**Gambar 6 Grafik Capaian Indikator TPB per PD Kota Metro**

*Sumber: Hasil Analisis, 2023*

Hasil capaian indikator TPB yang dilaksanakan oleh PD Kota Metro, bahwa jumlah capaian indikator yang telah mencapai target nasional terbanyak berada pada Dinas Kesehatan yaitu sebanyak 21 dari 34 indikator, sementara untuk jumlah capaian indikator yang belum mencapai target nasional terbanyak berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yaitu sebanyak 6 dari 20 indikator.

## BAB V

### ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Hasil Identifikasi TPB Paling Strategis Kota Metro

Proses Identifikasi dan Rumusan Isu Strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Metro 2025-2045 dilakukan melalui serangkaian langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas wilayah. Dalam hal ini, beberapa faktor kunci menjadi dasar pertimbangan agar perencanaan dan pelaksanaan dapat mengarah pada hasil yang efektif dan berkelanjutan. Dalam proses sintesis untuk perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) strategis di Kota Metro, beberapa faktor penting diperhitungkan guna memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas wilayah. Berikut ini adalah proses dan pertimbangan yang dilakukan:



Gambar 7 Proses Sintesis Untuk Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Strategis

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan proses yang telah dilakukan, telah teridentifikasi enam TPB pembangunan berkelanjutan yang memiliki urutan paling strategis. Dari hasil Isu-isu yang telah diidentifikasi akan menjadi fokus dalam upaya merumuskan rencana pembangunan Kota Metro untuk periode yang akan datang. Dengan mengidentifikasi isu-isu tersebut,

langkah-langkah konkret dapat dirancang untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Enam tujuan pembangunan berkelanjutan strategis, yakni:

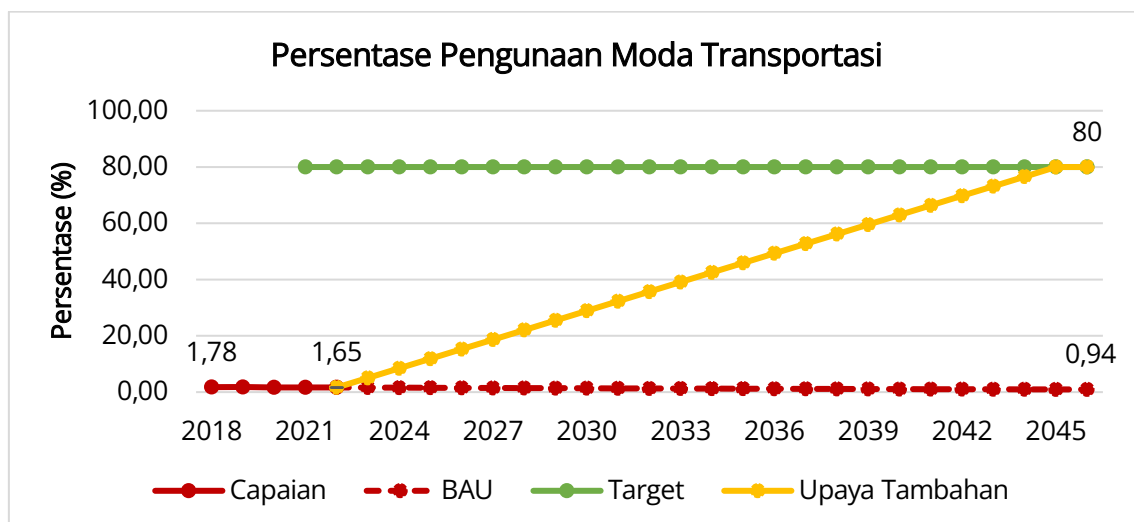
1. TPB 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
2. TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
3. TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim
5. TPB 15 : Ekosistem Daratan
6. TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

## 5.2 Skenario Pencapaian Target Terhadap TPB Paling Strategis

Skenario Pencapaian target terhadap TPB paling strategis merupakan langkah kunci dalam perumusan Kota Metro yang berkelanjutan dan inklusif. Pembahasan dalam alternatif skenario diharapkan dapat berdampak dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif skenario akan dibahas dalam dua skenario yaitu skenario dengan menggunakan upaya tambahan untuk dapat mencapai target serta skenario tanpa upaya tambahan yang sudah dapat mencapai target.

### 5.2.1 Skenario Pencapaian Target Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (TPB 11)

#### 1. Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum

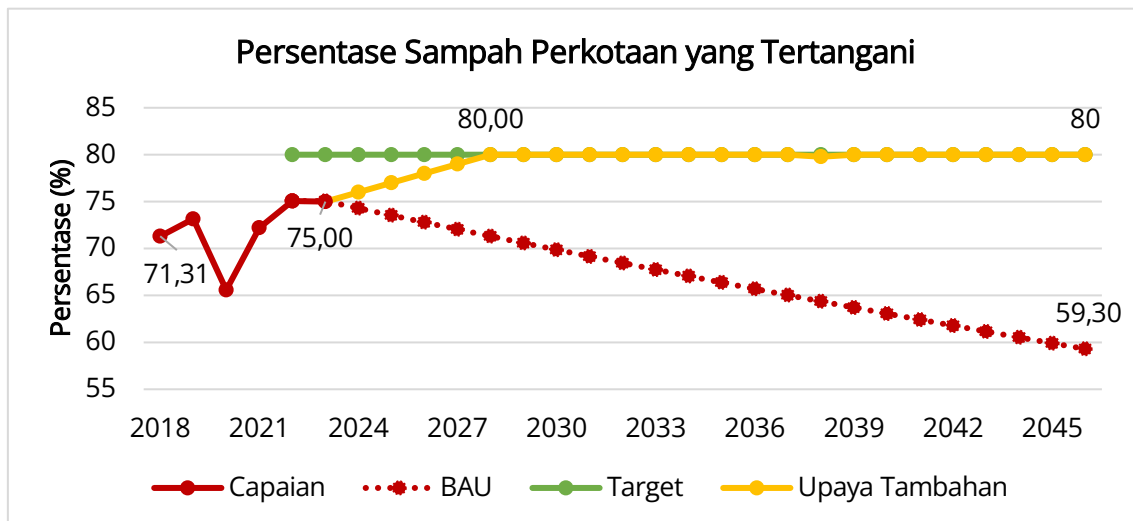


Gambar 8 Proyeksi dan Capaian: Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum

Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Proyeksi penggunaan moda transportasi umum mengungkapkan sebuah gambaran yang menggambarkan tantangan dalam mencapai target penggunaan moda transportasi umum pada tahun 2045. Dalam skenario *Business as Usual* (BaU), terlihat bahwa pencapaian target tersebut masih jauh dari harapan, dengan angka baru mencapai 0,93% di tahun 2045. Angka ini terpaut signifikan dari target nasional yaitu 80%. Dengan adanya upaya tambahan yang komprehensif, diharapkan penggunaan moda transportasi umum akan dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2030. Hal ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan, kualitas udara, serta kenyamanan dan efisiensi mobilitas Masyarakat.

## 2. Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani



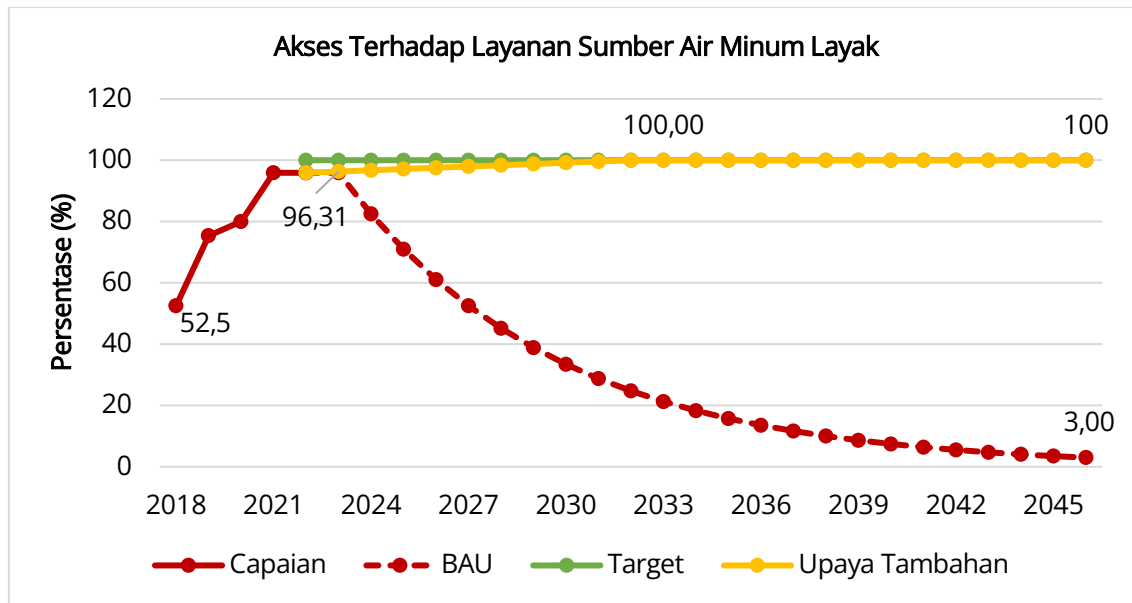
Gambar 9 Proyeksi Capaian dan Target: persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Persentase sampah perkotaan yang tertangani di Kota Metro adalah gambaran penting dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kawasan perkotaan ini. Pada tahun 2023, angka capaian sebesar 75% menunjukkan adanya usaha yang positif dalam menangani sampah di kota tersebut. Namun, hasil proyeksi dengan mempertimbangkan skenario *Business as Usual* (BaU) menggambarkan tren yang perlu mendapat perhatian serius. Persentase sampah perkotaan yang tertangani diproyeksikan akan terus menurun, mencapai angka 59% pada tahun 2045.

## 5.2.2 Skenario Pencapaian Target Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6)

### 1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak



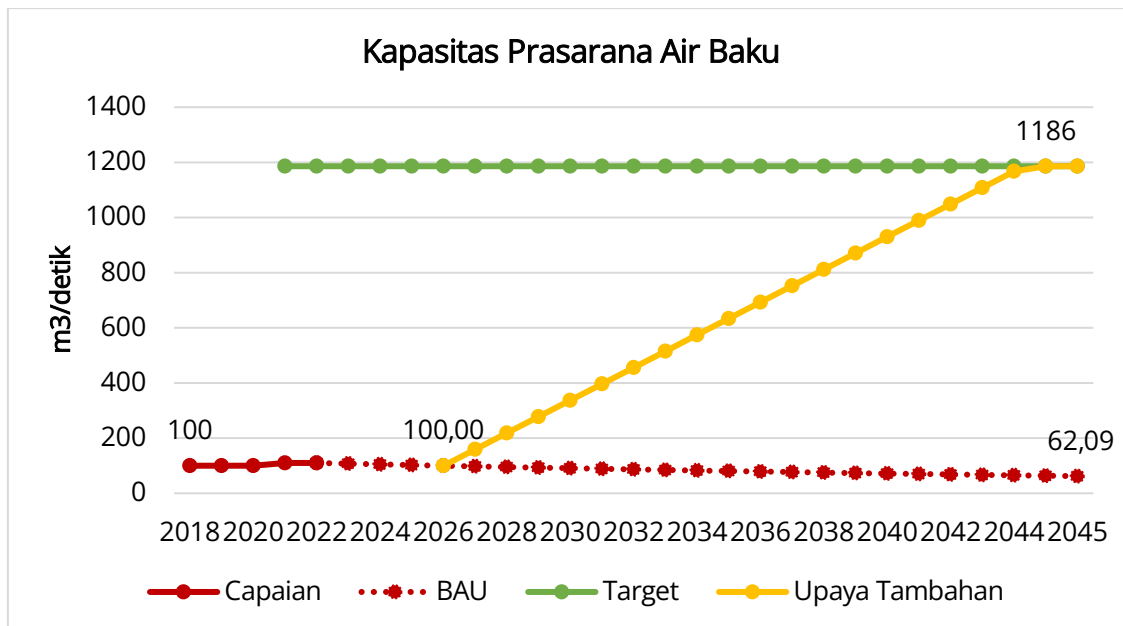
Gambar 10 Proyeksi Capaian dan Target: Akses Terhadap Layanan Air Minum Layak

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kota Metro menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan. Dalam skenario *Business as Usual* (BaU), terlihat tren penurunan yang mengarah pada persentase hanya 3% pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa upaya saat ini belum mampu mengatasi tantangan serius dalam penyediaan air minum yang aman bagi masyarakat.

Namun, ada harapan dalam bentuk upaya tambahan yang dapat membantu memutarbalikkan tren penurunan ini. Dengan adanya dorongan untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam menyediakan akses terhadap sumber air minum yang layak, ada peluang untuk mencapai target yang jauh lebih baik, yaitu 100% rumah tangga mendapatkan akses terhadap sumber air minum yang aman.

2. Kapasitas Prasarana Air Baku untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, serta Penyediaan Air Baku



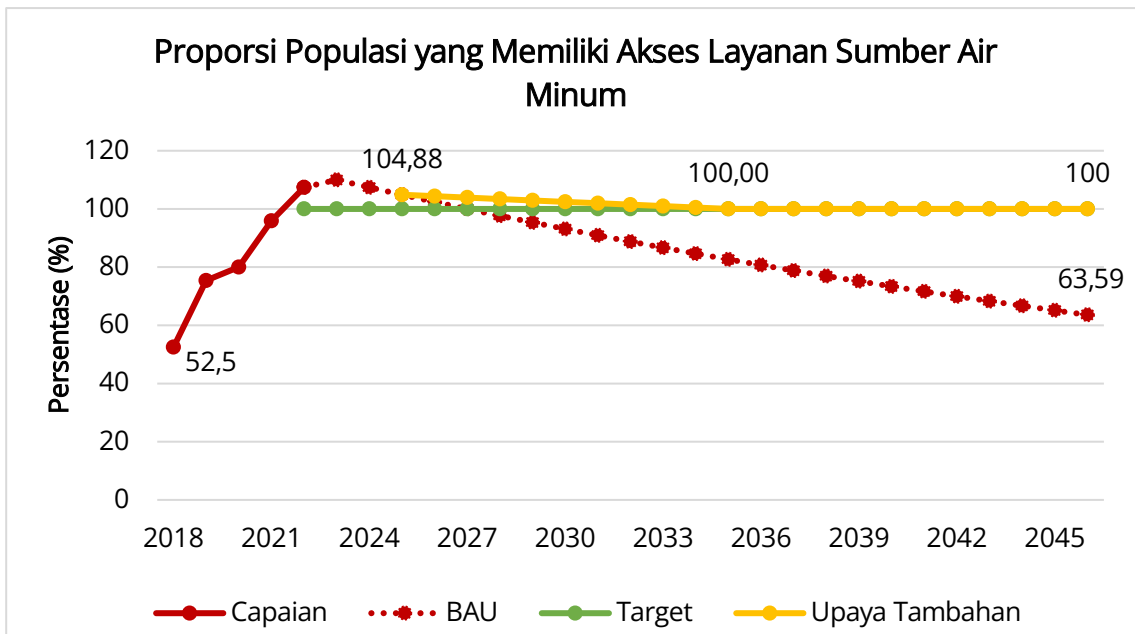
Gambar 11 Proyeksi Capaian dan Target: Kapasitas Prasarana Air Baku

Sumber: hasil Pengolahan, 2023

Kapasitas prasarana air baku di Kota Metro menggambarkan situasi yang memerlukan perhatian serius. Dalam proyeksi skenario *Business as Usual* (BaU), tampak bahwa tren peningkatan kapasitas prasarana air baku belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hingga tahun 2045, kapasitas prasarana air baku hanya mencapai 6 m<sup>3</sup>/detik, yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 1200 m<sup>3</sup>/detik.

Kebutuhan akan pasokan air yang memadai untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri tidak dapat diabaikan. Dengan mengambil tindakan yang tepat dan komprehensif, diharapkan Kota Metro dapat memastikan pasokan air yang mencukupi untuk seluruh sektor dan memenuhi target kapasitas prasarana air baku yang telah ditetapkan.

3. Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.



Gambar 12 Proyeksi Capaian dan Target: Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum

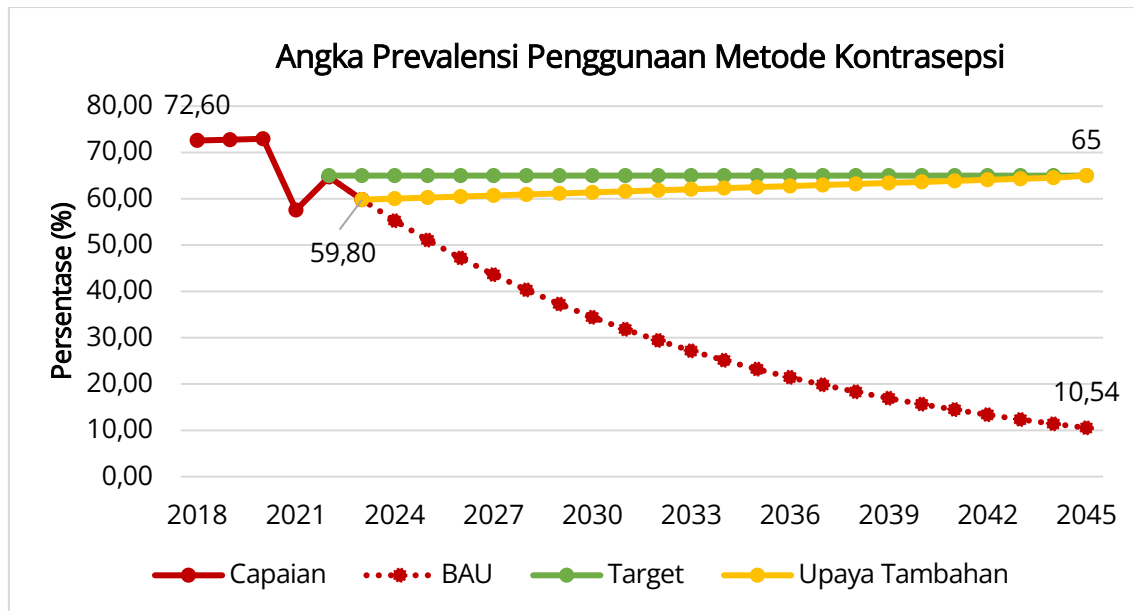
Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Proyeksi *Business as Usual* (BaU) terkait proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan di Kota Metro menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan penurunan yang terus berlanjut hingga tahun 2045, di mana proporsi ini hanya mencapai 63%. Kondisi ini memerlukan upaya tambahan yang signifikan untuk mencegah penurunan lebih lanjut dari target yang diharapkan sebesar 100%.

Dengan mengimplementasikan upaya yang ada, diharapkan dapat mempertahankan proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan hingga tahun 2045.

### 5.2.3 Skenario Pencapaian Target Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3)

#### 1. Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin



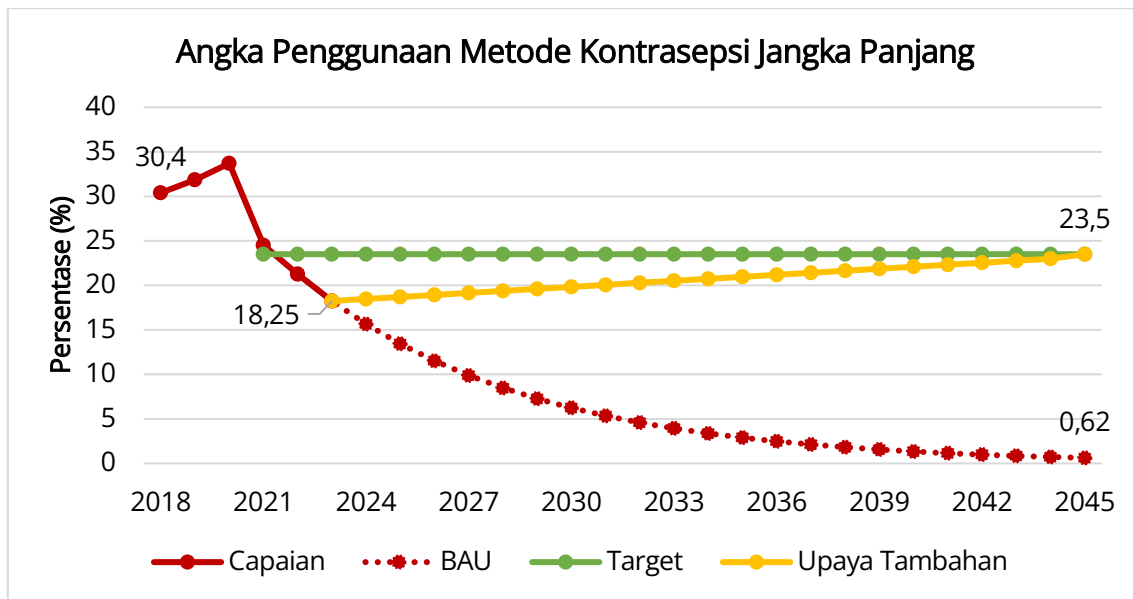
**Gambar 13 Proyeksi Capaian dan Target: Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin di Kota Metro menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan proyeksi Business as Usual (BaU) hingga tahun 2045 hanya mencapai 10%, jauh dari target nasional sebesar 65%. Situasi ini menandakan perlunya upaya tambahan yang signifikan untuk mencapai dan mempertahankan angka prevalensi yang diinginkan.



## 2. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern



**Gambar 14 Proyeksi Capaian dan Target: Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang**

*Sumber: Hasil Pengolahan, 2023*

Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern di Kota Metro yang diproyeksikan hingga mencapai 0,62% pada tahun 2045 melalui skenario *Business as Usual* (BaU) menjadi suatu perhatian yang serius. Mengingat pentingnya perencanaan keluarga dan pilihan metode kontrasepsi yang sesuai, diperlukan langkah-langkah konkret untuk membalikkan tren ini dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perhatian khusus, edukasi yang baik, akses yang memadai, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern di Kota Metro dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat memiliki pilihan yang lebih baik dalam merencanakan keluarga mereka.

### 5.3 Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan Awal RPJPD Kota Metro 2025-2045

Rekomendasi Arah Kebijakan dalam KLHS RPJPD Kota Metro 2025-2045 mencerminkan keselarasan dan pemantauan terhadap arahan kebijakan yang diterima dari dua dokumen penting, yaitu Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dan Paparan KLHS RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045. Dokumen-dokumen ini memberikan pedoman dan panduan strategis yang penting untuk membentuk rekomendasi arahan kebijakan Kota Metro dalam jangka panjang.

Tabel 2 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap TPB 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arah Kebijakan				Arah Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya timbulan sampah dan belum optimalnya sampah perkotaan yang tertangani</li> <li>Keterjangkauan moda transportasi umum perkotaan masih rendah</li> <li>Akses terhadap perumahan layak belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau:</b> Jika pertumbuhan perkotaan tidak diatur dengan baik, bisa menyebabkan harga perumahan yang tinggi dan mengakibatkan kesulitan bagi rumah tangga dengan pendapatan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan mengarah pada</li> </ul>	<p><b>Peningkatan Hunian Layak dan Terjangkau</b></p>	<p>Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemetaan dan identifikasi lahan milik pemerintah yang dapat digunakan sebagai lokasi potensial untuk pembangunan perumahan.</li> <li>Memperkuat sistem keuangan untuk mendukung program perumahan dengan menyusun skema pinjaman dan subsidi yang lebih terjangkau.</li> <li>Meningkatkan infrastruktur penunjang di sekitar kawasan perumahan, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperluas dan meningkatkan program kredit perumahan dengan bunga rendah untuk mendorong kepemilikan rumah.</li> <li>Mengembangkan lahan tidak produktif pemerintah untuk diubah menjadi kawasan perumahan yang terintegrasi.</li> <li>Menginisiasi pembangunan rumah susun berkelanjutan sebagai alternatif perumahan yang efisien dan ramah lingkungan.</li> <li>Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko bencana yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan dan mempromosikan konsep eco-housing sebagai bagian dari kebijakan perumahan berkelanjutan.</li> <li>Meningkatkan aksesibilitas transportasi di sekitar kawasan perumahan untuk mendukung mobilitas masyarakat.</li> <li>Mendorong penggunaan energi terbarukan dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan dan menerapkan rumah berbasis teknologi hijau dengan efisiensi energi dan manajemen limbah yang tinggi.</li> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di sekitar kawasan perumahan.</li> </ul>	<p>Identifikasi dan Pemanfaatan Lahan serta Peningkatan Penerapan Rumah Vertikal dalam upaya efisiensi lahan, serta penerapan energi hijau dalam hunian yang layak dan terjangkau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Dinas Perhubungan</li> </ul>

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
	<p>kawasan kumuh yang mempengaruhi kualitas air dan akses terhadap pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum:</b> Jika target peningkatan penggunaan transportasi umum tidak tercapai, maka jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di perkotaan akan terus meningkat. Ini dapat mengakibatkan polusi udara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas udara dan tanah, berdampak buruk pada pertanian perkotaan dan ketersediaan air bersih.</li> <li><b>Jumlah Korban dan Kerugian Akibat Bencana:</b> Jika tindakan mitigasi dan penanganan bencana tidak</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun kemitraan strategis dengan pengembang swasta untuk meningkatkan kapasitas pembangunan perumahan.</li> <li>Membangun sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan program perumahan.</li> </ul>	mempertimbangkan dampak perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan pembangunan.	pembangunan dan operasional perumahan.			
		<b>Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Transportasi Umum</b>	Penggunaan Moda Transportasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun dan memperluas jaringan transportasi umum untuk mencakup area yang lebih luas di dalam kota.</li> <li>Menyediakan fasilitas yang ramah lingkungan, termasuk jalur sepeda dan trotoar yang aman.</li> <li>Peningkatan frekuensi dan cakupan layanan transportasi umum untuk mencakup daerah yang belum terjangkau secara optimal</li> <li>Menyesuaikan jadwal operasional untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi dalam kendaraan transportasi umum yang ramah lingkungan, seperti bus dan kereta berbasis listrik atau hidrogen.</li> <li>Memperluas jaringan jalur hijau untuk mendukung mobilitas berkelanjutan.</li> <li>Mengintegrasikan sistem transportasi umum dengan moda transportasi lainnya, seperti sepeda umum atau layanan ridesharing.</li> <li>Pengembangan infrastruktur yang mendukung penggunaan transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi rutin terhadap rute dan layanan transportasi umum untuk memastikan efisiensi operasional.</li> <li>Menyesuaikan layanan sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat.</li> <li>Menetapkan target pengurangan emisi karbon dalam operasional transportasi umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan efisiensi energi armada transportasi umum.</li> <li>Menerapkan teknologi canggih untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi.</li> <li>Meningkatkan sistem informasi pintar untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik.</li> <li>Menyediakan aplikasi terpadu yang memberikan informasi tentang transportasi, cuaca, dan peristiwa lokal.</li> </ul>	Optimalisasi Sistem Transportasi Berkelanjutan Kota Metro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>Dinas Perhubungan</li> <li>Pemerintah</li> <li>Pihak swasta</li> <li>Akademisi</li> </ul>

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
	<p>diterapkan dengan baik dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan, maka jumlah korban dan kerugian ekonomi akibat bencana dapat meningkat. Bencana seperti banjir atau tanah longsor dapat mengganggu pasokan pangan dan air bersih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani:</b> Jika manajemen sampah perkotaan tidak efektif, sampah dapat mencemari sumber air dan tanah. Ini dapat berdampak negatif pada kualitas air yang digunakan untuk irigasi pertanian dan pasokan air minum.</li> <li>• <b>Jumlah Kota Hijau dan Ruang Terbuka Hijau:</b> Jika perkembangan kota tidak memperhitungkan kebutuhan akan ruang terbuka hijau, ini dapat</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan aksesibilitas transportasi umum bagi kelompok rentan, seperti penyandang difabilitas, lansia, dan anak-anak.</li> <li>• Menyediakan layanan transportasi khusus untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus.</li> <li>• Mengkaji rencana induk pengembangan Transportasi Berbasis <i>Transit-Oriented Development</i> (TOD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• multimoda, dengan menawarkan konektivitas antara berbagai jenis transportasi, termasuk kereta, bus, sepeda, dan jalan kaki.</li> <li>• Mengadopsi solusi teknologi cerdas, seperti pengaturan lampu lalu lintas yang dinamis berdasarkan volume lalu lintas.</li> <li>• Menerapkan sistem pembayaran tiket elektronik dan integrasi dengan aplikasi perjalanan umum.</li> <li>• Meningkatkan keamanan penumpang melalui pemantauan CCTV dan sistem keamanan di stasiun dan kendaraan umum.</li> <li>• Memastikan bahwa semua rute transportasi umum dapat diakses dengan mudah oleh penyandang difabilitas.</li> <li>• Mendorong penggunaan teknologi aksesibilitas, seperti pengumuman suara dan rambu braille di stasiun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengganti armada transportasi umum dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.</li> <li>• Menyediakan tarif yang fleksibel dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat.</li> <li>• Mengadopsi sistem pembayaran variabel berbasis penggunaan yang adil.</li> <li>• Mendukung konversi kendaraan umum menjadi kendaraan listrik dan menyediakan infrastruktur pengisian listrik yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merenovasi dan meningkatkan fasilitas di stasiun transportasi umum, termasuk tempat penungguan, toilet, dan area parkir sepeda.</li> <li>• Menyediakan fasilitas penunjang seperti ruang tunggu yang nyaman dan area bermain anak-anak.</li> <li>• Membangun kemitraan yang lebih erat dengan perusahaan swasta untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan transportasi umum.</li> <li>• Mendorong investasi swasta dalam teknologi dan infrastruktur transportasi berkelanjutan.</li> </ul>		

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
	mengurangi ketersediaan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau yang penting untuk sirkulasi air dan produksi pangan lokal.	<b>Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah berbasis Sirkular Ekonomi dengan Pendekatan Pengelolaan di Sumbernya</b>	Sampah Perkotaan yang Tertangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun kebijakan dan kerangka kerja untuk mendukung transisi menuju ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.</li> <li>Mendorong kolaborasi dengan industri dan bisnis lokal untuk mempromosikan penggunaan kembali dan daur ulang bahan.</li> <li>Menerapkan konsep 9R (Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Repurpose, Refurbish, Remanufacture, Recover, Recycle) dalam strategi pengelolaan sampah.</li> <li>Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti program kebersihan lingkungan dan bank sampah</li> <li>Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas TPS3R hingga mencakup tingkat kelurahan.</li> <li>Mengintegrasikan teknologi informasi untuk pemantauan dan manajemen efektif TPS3R.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong industri untuk mengadopsi model ekonomi sirkular dalam rantai pasok mereka.</li> <li>Memberikan insentif pajak atau insentif keuangan bagi industri yang berkomitmen pada praktik ekonomi sirkular.</li> <li>Meningkatkan ketertiban dan efisiensi pengelolaan sampah berbasis 9R melalui penilaian dan pembaruan berkala.</li> <li>Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi implementasi praktik 9R.</li> <li>Meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.</li> <li>Melibatkan pihak swasta dalam pengembangan fasilitas RDF skala besar.</li> <li>Mendorong peningkatan tingkat pemisahan sampah di tingkat Rumah Tangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari dan mengadopsi teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah berbasis 9R.</li> <li>Mengembangkan sistem monitoring otomatis untuk mendukung praktik 9R.</li> <li>Menerapkan model pengelolaan TPS3R terpadu yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemantauan teknologi, dan keberlanjutan finansial.</li> <li>Membentuk kemitraan strategis dengan produsen energi dan pihak swasta dalam pengembangan fasilitas RDF.</li> <li>Melakukan landfill mining secara terstruktur dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun model ekonomi sirkular lokal yang berkelanjutan, termasuk pengintegrasian pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat.</li> <li>Mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah berbasis 9R dengan pendekatan adaptif berdasarkan evaluasi kinerja dan perkembangan teknologi.</li> <li>Menerapkan standar kinerja dan kualitas layanan untuk praktik 9R.</li> <li>Melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan inovasi.</li> <li>Meningkatkan investasi dalam infrastruktur produksi dan distribusi Refuse-</li> </ul>	<p>Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan konsep 9R menjadi landasan kebijakan utama dalam penanganan sampah di tingkat kelurahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>LSM terkait lingkungan hidup</li> <li>Pemerintah</li> <li>Pihak swasta</li> <li>Akademisi</li> </ul>

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi dan mengimplementasikan proyek-proyek pengembangan Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif.</li> <li>Membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk investasi dalam teknologi RDF.</li> <li>Melakukan proyek penambangan landfill sebagai upaya eksplorasi potensi pemulihan bahan berharga dari area pembuangan sampah lama.</li> <li>Menyusun regulasi dan pedoman yang mendukung praktik landfill mining yang berkelanjutan.</li> <li>Menerapkan tarif sampah yang berbeda berdasarkan volume dan jenis sampah, memberikan insentif untuk pemisahan sampah di tingkat rumah tangga.</li> <li>Meningkatkan pengawasan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan target ambisius untuk mengurangi total volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.</li> <li>Melakukan langkah-langkah tegas untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.</li> <li>Mendorong bisnis dan pengecer untuk menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan.</li> <li>Mengembangkan program pengumpulan dan daur ulang sampah elektronik.</li> <li>Menerapkan peraturan untuk memastikan bahwa sampah elektronik tidak berakhir di tempat pembuangan sampah biasa.</li> <li>Mendorong penerapan metode pengolahan limbah yang mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan.</li> <li>Berkolaborasi dengan industri dan lembaga pemroses limbah untuk</li> </ul>	<p>berkelanjutan di sejumlah area pembuangan sampah yang telah ditentukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan rencana darurat untuk penanganan sampah selama situasi krisis atau bencana alam.</li> <li>Membangun kemitraan dengan industri untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai.</li> <li>Mendorong produsen untuk mengadopsi desain produk yang ramah lingkungan.</li> </ul>	<p>Derived Fuel (RDF) untuk mencapai skala produksi yang lebih besar.</p>		

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				<p>penegakan terhadap ketentuan tarif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk pemantauan kualitas lingkungan secara digital dan real-time sampai ke titik pencemar</li> <li>Peningkatan efisiensi pengumpulan dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas untuk memastikan bahan yang dapat didaur ulang tidak tercampur dengan sampah organik</li> </ul>	<p>mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular dan emisi rendah karbon dalam proses pengelolaan limbah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi terbaru untuk mengoptimalkan pengolahan limbah secara berkelanjutan</li> </ul>				
		<b>Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota</b>	<p>Jumlah Kota Hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di Kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengimplementasian Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro 2013-2033 untuk mampu menjaga serta meningkatkan ketersediaan RTH di Kota Metro.</li> <li>Mendorong pemilik lahan, termasuk lahan pemerintah, untuk melakukan pemanfaatan terhadap lahan tidak produktif, termasuk tanah terlantar atau lahan terbuka yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat regulasi yang melindungi RTH dari penggunaan yang tidak sesuai, pengrusakan ilegal, atau perusakan. Ini harus mencakup sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.</li> <li>Mengintegrasikan penghijauan dalam perencanaan dan desain ruang publik, seperti taman kota, trotoar, dan median jalan. Ini akan meningkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan teknologi untuk pengelolaan dan pemantauan RTH yang efisien, termasuk pemantauan berbasis sensor dan/atau sistem informasi geografis (SIG) untuk perencanaan dan pemeliharaan RTH.</li> <li>Membangun kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggalakkan konsep taman vertikal dan atap hijau di gedung-gedung perkotaan untuk memaksimalkan penggunaan lahan vertikal dan mempromosikan penghijauan.</li> <li>Memperkuat program pemeliharaan RTH dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait</li> </ul>	<p>Optimalisasi lahan, keterlibatan masyarakat, diversifikasi RTH dan Kerjasama lintas-sektor untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan Kota dan Keberlanjutan Lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>LSM terkait lingkungan hidup</li> <li>Pemerintah</li> <li>Pihak swasta</li> <li>Akademisi</li> </ul>

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				<p>tidak dimanfaatkan secara efisien, untuk dikonversi menjadi RTH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan penyediaan RTH sebagai bagian integral dari rencana tata ruang kota. Hal ini harus menjadi prioritas dalam proses perencanaan perkotaan.</li> <li>• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH dan menjaga lingkungan hijau melalui program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan sosialisasi.</li> <li>• Mendorong diversifikasi RTH dengan mengembangkan taman tematik, seperti taman edukasi alam, taman budaya, dan taman rekreasi khusus, untuk memenuhi kebutuhan beragam masyarakat.</li> <li>• Menetapkan standar perawatan dan pengelolaan RTH yang lebih tinggi, termasuk penerapan metode ekologis dan praktik</li> </ul>	<p>aksesibilitas RTH bagi warga kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun koridor hijau yang menghubungkan berbagai kawasan kota, meningkatkan konektivitas ekologis, dan menyediakan jalur hijau bagi penduduk kota untuk beraktivitas dan bertransportasi.</li> <li>• Mengkaji aksi konversi lahan yang tidak produktif menjadi RTH, dengan fokus pada peningkatan ketersediaan lahan hijau yang dapat diakses oleh masyarakat.</li> <li>• Mengintegrasikan pengelolaan air dan drainase yang berkelanjutan dalam perencanaan RTH untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan infiltrasi air tanah.</li> <li>• Mengembangkan sistem pemantauan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data terkait kondisi RTH, sehingga dapat lebih</li> </ul>	<p>dengan sektor swasta dan LSM dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan RTH, termasuk perawatan, penghijauan, dan pembangunan taman komunitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan jumlah dan kualitas taman perkotaan serta memperluas ruang terbuka di sekitar pusat-perkotaan untuk memberikan lebih banyak ruang rekreasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• Membangun infrastruktur hijau, seperti green roofs dan green walls, untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang vertikal di perkotaan dan meningkatkan</li> </ul>	<p>pengelolaan RTH untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan RTH yang telah diimplementasikan sebelumnya untuk menilai dampaknya dan menyempurnakan strategi kebijakan ke depan.</li> </ul>		





Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				berkelanjutan untuk meningkatkan keberlanjutan dan biodiversitas di dalam RTH.	responsif terhadap kebutuhan lokal.	keberlanjutan lingkungan. <ul style="list-style-type: none"><li>• Menggalakkan penanaman pohon produktif di RTH, seperti pohon buah dan tanaman obat, untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</li></ul>			

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 3 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Isu Strateigs	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya sekitar 59,23% dari total luas wilayah Kota Metro yang berkontribusi pada penyediaan air bersih</li> <li>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum optimal</li> <li>Beban pencemar sungai zat COD, BOD dan TSS tinggi akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum yang layak dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya air, mengancam daya dukung daya tampung air dan mengganggu produksi pangan.</li> <li>Kapasitas infrastruktur air baku yang tidak memadai dapat menghambat akses air bersih yang aman, berdampak pada produksi pangan dan pelayanan air bagi pulau-pulau yang membutuhkannya.</li> <li>Proporsi populasi tanpa akses air minum aman dan berkelanjutan meningkatkan</li> </ul>	<p><b>Peningkatan Aksesibilitas Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak</b></p>	<p>Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan infrastruktur air bersih dan jaringan distribusi di wilayah yang kurang terlayani, termasuk pengadaan sumur bor, instalasi pompa air, dan pipa distribusi.</li> <li>Menerapkan program pemantauan dan pemeliharaan sistem air untuk memastikan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan.</li> <li>Membuat program subsidi atau bantuan keuangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah agar dapat mengakses layanan air minum yang layak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengintegrasikan teknologi inovatif dalam tata kelola sumber daya air untuk meningkatkan efisiensi dan pemantauan.</li> <li>Mencari dan mengimplementasikan sumber air alternatif, seperti rain foresting (pengelolaan air hujan).</li> <li>Meningkatkan infrastruktur air bersih dan teknologi penyaringan air untuk memastikan pasokan air yang bersih dan aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengintegrasikan sistem Smart Water untuk monitoring real-time dan manajemen efisien distribusi air.</li> <li>Mendorong penelitian inovatif dalam teknologi penyediaan air dan keberlanjutan sumber air untuk mendukung pengembangan solusi baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan program untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air di seluruh sektor, termasuk rumah tangga, industri, dan pertanian.</li> <li>Membangun kemitraan aktif dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan air.</li> <li>Menginvestasikan dalam penelitian dan implementasi teknologi pemulihan air untuk mendaur ulang air limbah.</li> <li>Mengintegrasikan strategi pengelolaan air yang tahan perubahan iklim dan beradaptasi terhadap perubahan pola curah hujan.</li> </ul>	<p>Mengembangkan aksesibilitas terhadap air bersih dan sanitasi layak secara terintegrasi dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>PDAM Kota Metro</li> <li>Akademisi</li> <li>Lembaga penelitian terkait</li> </ul>

Isu Strateigs	Pengaruh terhadap DDDLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
	risiko pencemaran air dan penyakit terkait air, mengancam ketahanan pangan dan daya dukung daya tampung air.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi penyadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan pengurangan pemborosan.</li> <li>Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melalui forum partisipatif, sosialisasi dan program edukasi.</li> </ul>					
		<b>Peningkatan kapasitas prasarana air baku</b>	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, serta Penyediaan Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan air baku untuk memenuhi kebutuhan meningkatnya populasi dan industri.</li> <li>Mengintegrasikan inovasi sumber daya air terbarukan, seperti pemanfaatan air hujan, untuk meningkatkan ketersediaan air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan Smart Water Grid untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan distribusi air ke rumah tangga, perkotaan, dan industri.</li> <li>Menggunakan teknologi pemulihan air untuk mendaur ulang air limbah dan memasukkannya kembali ke sistem pasokan air baku.</li> <li>Mengembangkan sistem pengelolaan air baku terdesentralisasi untuk meningkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghubungkan lebih banyak wilayah dengan infrastruktur air terhubung untuk meningkatkan aksesibilitas air baku.</li> <li>Menerapkan sistem distribusi air yang adaptif, responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadopsi inovasi teknologi berkelanjutan, seperti teknologi pengolahan air tanpa limbah, untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.</li> <li>Mendorong pengelolaan air berbasis komunitas untuk memberdayakan masyarakat setempat dan memastikan inklusivitas.</li> <li>Mengimplementasikan sistem distribusi air</li> </ul>	Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya Air Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>Dinas Kesehatan</li> </ul>



Isu Strateigs	Pengaruh terhadap DDDLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan teknologi dan praktik terbaik untuk mengoptimalkan penggunaan air di sektor industri demi efisiensi sumber daya.</li> <li>Mengadopsi sistem pemantauan dan prediksi ketersediaan air berbasis teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu.</li> <li>Melakukan peningkatan dalam pemurnian air baku untuk memastikan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan.</li> </ul>	ketahanan dan efisiensi distribusi. <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan inovasi dalam tata kelola sumber daya air untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun infrastruktur air hijau, seperti ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air, untuk meningkatkan retensi air dan mendukung ekosistem perkotaan.</li> <li>Menyusun rencana adaptasi untuk mengelola dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air bak</li> </ul>	otomatis dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pengaturan aliran air.		<ul style="list-style-type: none"> <li>PDAM Kota Metro</li> <li>Akademisi</li> <li>Lembaga penelitian terkait</li> </ul>
		<b>Peningkatan Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan</b>	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan jangkauan layanan air minum aman dan berkelanjutan ke daerah-daerah yang masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengintegrasikan inovasi teknologi dalam distribusi air dan pengelolaan sistem untuk efisiensi dan keberlanjutan.</li> <li>Memasukkan sumber daya air terbarukan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan inovasi dalam penetapan tarif berbasis penggunaan untuk mendorong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan sistem distribusi air yang adaptif untuk menyikapi perubahan pola penggunaan dan kebutuhan masyarakat.</li> </ul>	Peningkatan Infrastruktur Air Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>



Isu Strateigs	Pengaruh terhadap DDDLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
			dan Berkelanjutan.	<p>belum tercover secara memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadopsi teknologi terbaru dalam distribusi air untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengaliran air.</li> <li>Menggunakan teknologi pemantauan kualitas air untuk memastikan air yang disediakan memenuhi standar kesehatan.</li> <li>Meningkatkan pengawasan kualitas air secara berkala untuk memastikan bahwa air yang disediakan aman untuk digunakan dan/atau dikonsumsi.</li> <li>Menetapkan kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa penyediaan air minum yang aman dan</li> </ul>	<p>seperti air hujan atau air daur ulang, dalam sistem distribusi air.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengimplementasikan program sanitasi dan higiene yang komprehensif untuk memastikan akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman.</li> <li>Menetapkan kebijakan tarif air yang adil dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.</li> <li>Meningkatkan dan mengintegrasikan sistem Smart Water Grid untuk pengelolaan yang lebih adaptif dan efisien.</li> </ul>	<p>efisiensi penggunaan air.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan penggunaan Smart Water Metering untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan memonitor konsumsi air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan program pendanaan inovatif untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur air berkelanjutan.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>PDAM Kota Metro</li> <li>Akademisi</li> <li>Lembaga penelitian terkait</li> </ul>



Isu Strateigs	Pengaruh terhadap DDDLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam perencanaan perkotaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber air dan pemeliharaan infrastruktur air minum</li> </ul>					
		<b>Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan</b>	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun dan meningkatkan infrastruktur air bersih untuk mengurangi risiko kontaminasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap air yang aman.</li> <li>Menetapkan kebijakan ketat untuk mengurangi polusi air, dengan fokus pada pengelolaan limbah industri dan rumah tangga.</li> <li>Menerapkan teknologi inovatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan infrastruktur pemantauan otomatis untuk mengidentifikasi perubahan kualitas air secara real-time.</li> <li>Meningkatkan kapasitas daur ulang dan memperluas program pengelolaan sampah yang berfokus pada bahan daur ulang.</li> <li>Mengembangkan dan memperluas jaringan IPAL komunal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan air limbah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas IPAL komunal untuk menangani volume limbah yang semakin besar seiring pertumbuhan kota.</li> <li>Mendorong industri dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan kembali barang daur ulang dengan insentif dan regulasi yang mendukung.</li> <li>Melakukan program rehabilitasi dan konservasi untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengintegrasikan sistem pengelolaan air dan sampah secara terpadu untuk mencapai efisiensi maksimum.</li> <li>Memperluas jaringan distribusi air bersih ke wilayah yang masih belum terlayani.</li> <li>Menyusun kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam pengelolaan air dan sampah untuk menghadapi tantangan masa depan.</li> </ul>	Peningkatan Penggunaan <i>septic tank</i> dan merencanakan pengembangan IPAL Komunal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Akademi</li> <li>Lembaga penelitian terkait</li> </ul>



Isu Strateigs	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				dalam sistem pengelolaan air minum dan sanitasi untuk mengurangi dampak lingkungan. <ul style="list-style-type: none"><li>• Mendorong penggunaan <i>septic tank</i> di rumah tangga untuk mengolah limbah domestik secara aman.</li></ul>		meningkatkan kualitas air sungai dan danau di sekitar Kota Metro.			

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Angka Kematian Neonatal.</li> <li>Peningkatan kasus penyakit infeksi menular seksual dan HIV/AIDS</li> </ul>	<p>TPB 3 tidak memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Metro</p>	<p>Mengurangi rasio angka kematian ibu, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka Kematian Ibu (AKI)</li> <li>Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar di semua wilayah Kota Metro</li> <li>Melakukan program edukasi kesehatan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat, perawatan prenatal, dan pencegahan penyakit</li> <li>Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, termasuk pemahaman pentingnya perawatan prenatal dan postnatal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan frekuensi dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, termasuk pemeriksaan rutin dan pendampingan kelahiran.</li> <li>Mendorong pelaporan dan analisis data kesehatan untuk mendeteksi masalah secara dini.</li> <li>Menyediakan dukungan psikologis bagi ibu hamil dan pasangan.</li> <li>Memperluas layanan kesehatan mental dalam konteks kesehatan maternal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melanjutkan investasi dalam sistem kesehatan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan.</li> <li>Menggalakkan kerjasama dengan sektor swasta dan LSM untuk memperluas jangkauan program kesehatan.</li> <li>Mengintegrasikan teknologi untuk memfasilitasi konsultasi kesehatan jarak jauh.</li> <li>Membangun pusat kesehatan modern dan terjangkau.</li> <li>Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas obat-obatan penting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadopsi teknologi medis terkini untuk meningkatkan diagnosis dan perawatan maternal.</li> <li>Meningkatkan konektivitas data antara pusat kesehatan dan rumah sakit.</li> </ul>	<p>Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, penguatan sistem pemantauan kesehatan, penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan infrastruktur kesehatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li> <li>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</li> <li>Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)</li> <li>Pemerintah</li> <li>Pihak swasta</li> </ul>
			<p>Mengakhiri epidemi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prevalensi HIV pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan teknologi untuk</li> </ul>		



Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
		AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	<p>populasi dewasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</li> </ul>	<p> Pencegahan dan pengobatan TB dengan memperluas cakupan pemeriksaan dan pengobatan TB. Fokus pada pendeteksian dini, perawatan yang tepat, dan edukasi masyarakat tentang pencegahan TB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengintensifkan sosialisasi penyuluhan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan.</li> <li>Melibatkan komunitas dalam program edukasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai penyakit menular.</li> <li>Meningkatkan kapasitas sistem</li> </ul>	<p>pengendalian vektor dan sanitasi lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.</li> <li>Menggelar sosialisasi intensif untuk mengatasi stigma yang terkait dengan penyakit menular.</li> <li>Mendorong inklusivitas dan dukungan sosial bagi individu yang terkena dampak.</li> </ul>	<p>mempercepat diagnosis dan pelacakan kasus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan aplikasi mobile untuk pemantauan dan peringatan dini.</li> </ul>	<p>dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga Kota Metro.</p>	<p>edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosialisasi anti-stigma dan diskriminasi, serta penguatan sistem kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Akademisi</li> <li>Pemerintah</li> <li>Swasta</li> <li>LSM terkait</li> </ul>

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				<p>pemantauan kesehatan untuk mendeteksi, melacak, dan merespons epidemi secara cepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pelaporan aktif dan transparan dari fasilitas kesehatan dan penyedia layanan.</li> <li>• Meningkatkan ketersediaan layanan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan di pusat kesehatan.</li> </ul>					
		Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan melalui Partisipasi terhadap Asuransi Kesehatan	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan primer di tingkat komunitas.</li> <li>• Memperluas jaringan pusat kesehatan masyarakat.</li> <li>• Melakukan sosialisasi edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan cakupan asuransi kesehatan untuk mencakup lebih banyak warga Kota Metro. agar dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan kelompok rentan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendirikan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengevaluasi efektivitas program asuransi kesehatan.</li> <li>• Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan melakukan penyesuaian kebijakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun model keuangan asuransi kesehatan yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan program jangka panjang.</li> <li>• Mendorong inovasi dalam</li> </ul>	Perencanaan dan peningkatan layanan Kesehatan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</li> <li>• Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				tentang manfaat asuransi kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.</li> <li>Melibatkan masyarakat dalam penilaian dan umpan balik terhadap layanan yang diberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun pusat kesehatan terpadu untuk meningkatkan kualitas layanan.</li> </ul>	pembiayaan kesehatan.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)</li> <li>Pemerintah</li> <li>Pihak swasta</li> </ul>
		menjamin akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang keluarga berencana dan metode kontrasepsi modern. Sosialisasi informasi yang luas dan program pendidikan di sekolah-sekolah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pilihan kontrasepsi yang aman dan efektif. Untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperluas pelayanan prenatal dan postnatal untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.</li> <li>Meningkatkan ketersediaan layanan dukungan emosional bagi ibu-ibu baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dalam bidang kesehatan reproduksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong inovasi dalam pembiayaan kesehatan.</li> </ul>	Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi, serta Jejaring dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li> <li>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</li> <li>Pemerintah</li> <li>Pihak swasta</li> </ul>



Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				<p>mendukung perlindungan sosial adaptif, bantuan sosial dapat diberikan kepada keluarga yang ingin menggunakan metode kontrasepsi modern</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperluas aksesibilitas Masyarakat melalui pusat-pusat kesehatan reproduksi di seluruh wilayah Kota Metro.</li><li>• Memperluas akses dan pengetahuan tentang metode kontrasepsi jangka panjang yang aman dan efektif. Program keluarga berencana harus mengintegrasikan penawaran metode kontrasepsi jangka panjang sebagai opsi yang lebih mudah diakses.</li></ul>					



Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				<ul style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan Sosialisasi edukasi intensif tentang kepentingan dan metode keluarga berencana.</li><li>Menyediakan akses mudah terhadap alat kontrasepsi dan pelayanan keluarga berencana.</li></ul>					

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim

Isu Strategis	Pengaruh Terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arah Kebijakan				Arah Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Metro memiliki risiko bencana dengan kelas risiko sedang</li> <li>Kota Metro tergolong indeks kerentanan perubahan iklim ke dalam kelas Sedang</li> </ul>	<p>Perubahan iklim berpotensi negatif mempengaruhi Daya Dukung Daya Tampung Air dan Pangan di Kota Metro.</p> <p>Hal ini disebabkan oleh penurunan ketersediaan air bersih karena perubahan pola hujan dan aliran sungai, serta ketidakpastian dalam produksi pangan akibat suhu yang meningkat dan gangguan pada pertanian.</p> <p>ketidakterpaduan kebijakan perubahan iklim dalam perencanaan nasional juga menjadi masalah. Selain itu, kerentanan terhadap</p>	<p><b>Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam</b></p>	<p>Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan pembuatan Dokumen RPB sebagai acuan penanggulangan Bencana Kota Metro</li> <li>Memperkuat infrastruktur kota, termasuk drainase, tanggul, dan bangunan tahan gempa.</li> <li>Menyusun rencana tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana untuk pembangunan berkelanjutan.</li> <li>Melaksanakan program edukasi masyarakat tentang risiko iklim dan tindakan adaptasi yang dapat diambil.</li> <li>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penanganan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memitigasi dampak bencana alam.</li> <li>Mengintegrasikan teknologi seperti sensor cuaca dan pemantauan satelit.</li> <li>Meningkatkan kesiapan dan kemampuan sistem evakuasi.</li> <li>Membangun infrastruktur evakuasi yang memadai dan aman untuk memastikan cepatnya evakuasi dalam situasi darurat.</li> <li>Menjamin bahwa kebijakan dan infrastruktur mendukung kebutuhan kelompok rentan.</li> <li>Adopsi dan integrasi teknologi ramah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat respons dan pemulihan pasca-bencana.</li> <li>Meningkatkan dan mengelola ruang terbuka hijau sebagai strategi penyerapan air dan mitigasi panas kota.</li> <li>Mengembangkan taman kota yang berfungsi ganda sebagai tempat penampungan air.</li> <li>Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur dampak kebijakan dan program ketahanan iklim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengimplementasikan konsep smart city dalam manajemen bencana untuk mempercepat respons dan pemulihan.</li> <li>Melakukan evaluasi rutin terhadap program ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.</li> <li>Membangun infrastruktur yang dapat bertahan terhadap perubahan iklim.</li> <li>Mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih presisi dan responsif.</li> <li>Menyusun mekanisme komunikasi yang efektif kepada masyarakat dalam situasi darurat.</li> </ul>	<p>Meningkatkan ketahanan Kota Metro terhadap perubahan iklim melalui rencana penanggulangan bencana dan juga persiapan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dengan prinsip</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> </ul>

Isu Strategis	Pengaruh Terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
	<p>bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim dapat merusak infrastruktur krusial dan produksi pangan.</p> <p>Oleh karena itu, Kota Metro harus mengambil langkah-langkah adaptasi yang konkret untuk memitigasi dampak negatif ini, termasuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan investasi dalam pertanian tangguh iklim.</p>			<p>perubahan iklim melalui program edukasi dan pelibatan komunitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat pendidikan, peningkatan kesadaran, serta melatih kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim untuk menghasilkan langkah-langkah berkelanjutan dan terarah</li> <li>Pelaksanaan kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga dalam merancang dan melaksanakan strategi penanganan perubahan iklim, mencakup sharing</li> </ul>	<p>lingkungan dan pengetahuan lokal dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana dan iklim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesiapsiagaan dan respons sektor kesehatan dalam menghadapi KLB yang terkait dengan perubahan iklim, termasuk penyakit vektor seperti malaria dan demam berdarah.</li> <li>Penerapan kebijakan perencanaan tata ruang di Kota Metro mencakup analisis risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim dalam setiap pembangunan dan pengembangan wilayah.</li> </ul>				



Isu Strategis	Pengaruh Terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
				pengetahuan, sumber daya, dan komitmen Bersama • Pengintegrasian strategi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam dokumen rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan					

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Tabel 6 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap TPB 15 Ekosistem Daratan

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidacukupan Ruang Terbuka Hijau</li> <li>• Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Hanya 17,13%</li> <li>• Tantangan dalam Pemenuhan Regulasi</li> <li>• Optimalisasi Pembangunan di Tingkat Lokal</li> </ul>	<p>Keterbatasan RTH dapat menyebabkan degradasi ekosistem kota, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas tanah, dan kerusakan ekosistem air.</p> <p>Proporsi RTH yang rendah dapat berkontribusi pada krisis air dengan mengurangi daya tampung alamiah untuk penyimpanan air dan peningkatan risiko banjir akibat kurangnya lahan resapan.</p> <p>Dengan rendahnya proporsi RTH, daya tampung lingkungan</p>	<p><b>Peningkatan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Metro</b></p>	<p>Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan. (RTH publik ditambah RTH privat) acuan Perwali No. 20 Tahun 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemetaan wilayah yang potensial untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>• Mendorong pembangunan taman kota yang dapat diakses oleh masyarakat luas.</li> <li>• Melakukan program penanaman pohon massal di ruang terbuka yang ada.</li> <li>• Mendorong pemilik lahan privat untuk menanam pohon di pekarangan dan area komersial mereka.</li> <li>• Memperkenalkan konsep desain kota yang berkelanjutan, memprioritaskan pejalan kaki dan sepeda, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas RTH dengan pemilihan jenis tanaman yang mendukung biodiversitas dan menyesuaikan dengan iklim setempat.</li> <li>• Mengintegrasikan elemen seni dan rekreasi dalam perencanaan RTH.</li> <li>• Mendorong pengembangan taman vertikal pada bangunan-bangunan tinggi.</li> <li>• Memfasilitasi pengembangan atap hijau di bangunan-bangunan untuk meningkatkan luas RTH.</li> <li>• Meningkatkan konservasi lahan terbuka untuk melindungi ekosistem alami.</li> <li>• Melibatkan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintegrasikan RTH sebagai bagian dari strategi adaptasi iklim kota.</li> <li>• Membangun taman hujan dan area resapan air untuk mengatasi perubahan pola curah hujan.</li> <li>• Membangun jalur hijau atau green corridor yang menghubungkan berbagai taman dan RTH di seluruh kota.</li> <li>• Mendorong pengembangan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda yang terintegrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan RTH sebagai pusat aktivitas komunitas, termasuk pusat seni dan kebudayaan, lapangan olahraga, dan tempat rekreasi.</li> <li>• Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan RTH.</li> <li>• Mengintegrasikan penggunaan energi terbarukan dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH.</li> <li>• Menerapkan teknologi hijau untuk penerangan dan pengelolaan air di taman-taman kota.</li> </ul>	<p>Perlindungan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro yang berbasis <i>Eco-City</i> dengan memaksimalkan lahan yang ada di Kota Metro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>• Swasta</li> <li>• Pemerintah</li> </ul>



Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
	untuk menyerap dampak aktivitas manusia seperti polusi, limbah, dan pertumbuhan penduduk menjadi terbatas. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.			<p>mengintegrasikan RTH dalam struktur kota.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Mengadopsi prinsip-prinsip konsep Eco-City untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.</li></ul>	<p>dalam program pengelolaan dan pelestarian lahan terbuka.</p>				

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7 Rekomendasi Arah Kebijakan terhadap 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahalnya penerapan teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan karena sebagian besar berasal dari luar negeri</li> <li>Institusi yang mengaplikasikan teknologi energi baru terbarukan sangat terbatas</li> <li>Peran akademisi belum terimplementasikan secara konkret dalam penemuan teknologi energi baru terbarukan secara lokal</li> <li>Biaya produksi energi baru terbarukan lebih mahal daripada bahan bakar fosil mengingat adanya subsidi layanan umum bagi Pertamina maupun PLN</li> <li>Harga BBM lebih murah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi energi baru terbarukan yang rendah dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada bahan bakar fosil, yang pada gilirannya meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat berkontribusi pada perubahan iklim dan merugikan daya dukung lingkungan.</li> <li>Proporsi EBT yang rendah dapat menghambat investasi dan pengembangan teknologi bersih. Hal ini dapat merugikan daya dukung</li> </ul>	<p><b>Perencanaan dan Pengimplementasian Energi Ramah Lingkungan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bauran energi terbarukan</li> <li>Penurunan Emisi GRK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas listrik secara luas bagi seluruh penduduk.</li> <li>Mengembangkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas listrik.</li> <li>Mengidentifikasi lokasi potensial untuk instalasi panel surya, turbin angin, dan sumber energi terbarukan lainnya.</li> <li>Memastikan instalasi energi terbarukan di wilayah yang strategis dan berorientasi pada efisiensi.</li> <li>Membangun kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengintegrasikan teknologi smart grid untuk meningkatkan efisiensi distribusi energi.</li> <li>Membangun jaringan yang terhubung secara pintar untuk pengelolaan dan pengawasan distribusi energi.</li> <li>Meningkatkan kapasitas produksi energi terbarukan melalui investasi dalam instalasi baru dan peningkatan kapasitas instalasi yang sudah ada.</li> <li>Mendorong inovasi dalam teknologi penyimpanan energi untuk mengatasi tantangan penyimpanan energi terbarukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong konsep kota hijau yang memprioritaskan transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah yang baik, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.</li> <li>Mengintegrasikan konsep-konsep inovatif untuk meminimalkan jejak karbon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur kemajuan implementasi kebijakan energi terbarukan.</li> <li>Mempertimbangkan penerapan teknologi penangkapan karbon pada sektor industri yang masih bergantung pada sumber energi fosil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengimplementasikan konsep kota pintar secara menyeluruh, terintegrasi dengan solusi energi terbarukan.</li> <li>Mengadopsi teknologi kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi energi.</li> <li>Pengembangan program dan insentif yang mendorong penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga panas bumi, biomassa, dan lainnya. Pemerintah setempat dapat memberikan insentif fiskal, subsidi, atau kemudahan akses ke teknologi energi terbarukan bagi masyarakat dan bisnis</li> </ul>	<p>Pengimplementasian Energi Ramah Lingkungan untuk menggantikan Energi Konvensional menuju Net-Zero Emission di Tahun 2060</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan Listrik Negara</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> </ul>

Isu Strategis	Pengaruh terhadap DDDTLH	Sasaran Pokok	Indikator	Arahan Kebijakan				Arahan Kebijakan Pembangunan	PD yang Terlibat
				Periode I 2025-2029	Periode II 2030-2034	Periode III 2035-2039	Periode IV 2040-2045		
dibandingkan dengan harga energi terbarukan yang harga dasar produksinya lebih mahal	lingkungan karena minimnya inovasi yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi dalam penggunaan energi.			<p>dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk inovasi dalam teknologi energi terbarukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun skenario perencanaan untuk menggantikan sumber energi konvensional dengan energi terbarukan sesuai dengan Target Nasional dalam RPJPN 2025-2045</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi mikrogrid atau jaringan listrik mandiri pada tingkat komunitas atau desa kecil dapat membantu dalam menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama.</li> </ul>	Ini akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari industri yang sulit digantikan oleh energi terbarukan			

Sumber: Hasil Analisis, 2023

## BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan hasil proses penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Analisis daya dukung di Kota Metro menunjukkan bahwa status daya dukung air masih berada dalam status belum terlampaui, dengan potensi ketersediaan air mencapai 1.698.848.889,09 m<sup>3</sup>/tahun. Namun, perhatian khusus perlu diberikan pada daya dukung pangan yang menunjukkan status sudah terlampaui, ditandai dengan selisih ketersediaan dan kebutuhan penyediaan bahan pangan sebesar - 130.723.511.800 kkal/tahun.
- 2) Sebagai hasil dari perumusan dan sintesa terhadap isu pembangunan berkelanjutan di Kota Metro, maka dihasilkan enam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) strategis yang selanjutnya dikaji lebih lanjut dalam muatan alternatif penyempurnaan serta perumusan rekomendasi pembangunan berkelanjutan. Meliputi TPB 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, TPB 15 Ekosistem Daratan, dan TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau. Pengidentifikasi ini menjadi landasan utama untuk merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Analisis capaian indikator TPB menggambarkan realitas pencapaian Kota Metro dalam memenuhi target nasional. Sebanyak 40,76% telah berhasil mencapai target nasional, sementara 19,02% sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Namun, sebesar 25% belum mencapai target dan belum dilaksanakan, dan 15,22% tidak memiliki data yang cukup, menunjukkan perlunya pengumpulan data lebih lanjut untuk memahami konteks lebih mendalam.
- 4) Melalui analisis capaian indikator oleh PD Kota Metro, Dinas Kesehatan berhasil mencatat capaian indikator terbanyak yang telah mencapai target nasional (21 dari 34 indikator). Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,



Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mencatat capaian indikator terbanyak yang belum mencapai target nasional (6 dari 20 indikator). Pemahaman terhadap pencapaian ini menjadi kunci untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di berbagai sektor.

- 5) Sebagai catatan penting, keterbatasan pengkajian terutama terkait dengan skenario daya dukung lingkungan perlu diperhatikan. Pengkajian memfokuskan pada tren kebutuhan yang meningkat dan ketersediaan yang stabil di angka baseline. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proyeksi ketersediaan daya dukung, khususnya air dan pangan, perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam mengoptimalkan keberlanjutan lingkungan.

Melalui kesimpulan ini, diharapkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat menjadi salah satu instrument yang berguna dan digunakan merumuskan kebijakan pembangunan Kota Metro yang berkelanjutan dan berdaya dukung lingkungan. Pemerintah dan *stakeholder* dapat bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memperbaiki capaian yang belum optimal, dan merespons tantangan masa depan dengan bijak.